



**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**





BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka perlu

menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2752);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2752) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Isi dan Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER 1 (SATU) TAHUN 2024;
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati ini diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

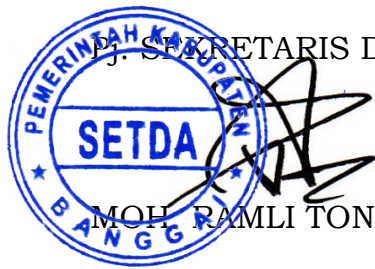
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Juli 2024

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 26 Juli 2024



Dj. S. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2850

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

Kata Pengantar

Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Semoga Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024 menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam rangka menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah serta dapat memenuhi harapan semua pihak untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai secara berkelanjutan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I - 5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2024	II - 2
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .	II - 1
2.2. Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya	II – 30
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024	III - 1
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024	III - 20
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
5.1 Perubahan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2024	V - 1
5.2 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2024	V - 9
BAB VI : PENUTUP	VI - 1

Daftar Tabel

Tabel	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	II - 2
Tabel	2.2	Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024 Semester I dan Prognosis 6 (enam) Bulan berikutnya	II - 32
Tabel	3.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023	III - 5
Tabel	3.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah).....	III - 7
Tabel	3.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2019–2023 (Juta Rupiah).....	III - 8
Tabel	3.4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019–2023	III - 10
Tabel	3.5	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2019- 2023	III - 11
Tabel	3.6	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2024	III - 19
Tabel	3.7	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)	III – 22
Tabel	3.8	Realisasi APBD TA. 2023 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)	III - 28
Tabel	3.9	Realisasi APBD TA. 2023 dan Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 (Rupiah)	III - 33
Tabel	3.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)	III - 34
Tabel	4.1	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2024	IV - 4

Tabel	4.2	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024	IV - 10
Tabel	4.3	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah Kabupaten Banggai tahun 2024	IV - 12
Tabel	4.4	Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2024	IV - 16
Tabel	5.1	Organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah yang melakukan Penambahan, Pengurangan dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2024	V - 4
Tabel	5.2	Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024	V - 9
Tabel	5.3	Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah	V - 10

Daftar Gambar

Gambar 3.1	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah) Tahun 2019–2023	III - 4
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2019–2023 (%)	III - 9
Gambar 3.3	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2019–2023	III - 12
Gambar 3.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019-2024	III - 14
Gambar 3.5	Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024	III - 15
Gambar 3.6	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2019 – 2023 ..	III - 16
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2013–2023	III - 17
Gambar 3.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2016–2023	III - 17
Gambar 4.1	Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024	IV - 1
Gambar 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024	IV - 3
Gambar 4.3	Sinkronisasi/Keterhubungan Misi Daerah Tahun 2021–2026 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024	IV - 9
Gambar 4.4	Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024	IV - 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor : 17 Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagai penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026. RKPD Tahun 2024 disusun untuk memastikan efektivitas pembangunan di Kabupaten Banggai guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, melalui sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 264 ayat 5 menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) s/d (9) disebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan dan /atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 di susun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- 
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Nomor 143).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan daerah Kabupaten Banggai sebagai akibat dari adanya beberapa perubahan asumsi yang sudah ditetapkan, sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2024. Sedangkan Tujuan Perubahan RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, antar sektor pembangunan, antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai Dasar bagi Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) terutama indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan memuat uraian tentang : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2024, yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat uraian tentang : Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2024 serta Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat uraian tentang perubahan Tujuan, Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat uraian tentang perubahan rencana program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah beserta Perangkat Daerah pengampunya di sertai perubahan kerangka pendanaan untuk Tahun Anggaran 2024.
- BAB VI Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan di maksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.

2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2024 semester I, hasilnya dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
1	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Indeks Pembangunan Pendidikan Manusia									
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pencapaian SPM Pendidikan Dasar		50,02%	85,31%	62,13%	72,83%	87,68%	54,06%	61,65%	DINAS PENDIDIKAN
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini		8,14%	80,67%	80,67%	100%	100%	86,31%	86,31%	
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar		94,07%	98,83%	98,83%	100%	100%	96,25%	96,25%	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang efektif menerapkan pengembangan kurikulum		46,80%	100%	100%	100%	85%	64,53%	75,92%	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang memiliki ijazah Diploma		56,84%	100%	100%	100%	85%	71,22%	83,79%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
1	01	04		(D.IV), S1, dan sertifikat pendidik pada satuan pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non-formal/ Kesetaraan								
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memiliki izin Operasional	100%	85%	85%	100%	90%	95%	95%	
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang efektif mengembangkan bahasa dan sastra melalui kurikulum muatan lokal	11,24%	75%	75%	100%	75%	32,49%	43,32%	
1	02	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia								
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian SPM bidang Kesehatan	87,13%	100%	90%	90%	100%	88,08%	88,08%	DINAS KESEHATAN
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	82,87%	100%	91,63%	91,63%	95%	85,79%	90,31%	DINAS KESEHATAN
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	76,94%	100%	60,40%	60,40%	90%	71,43%	79,36%	
			Program Pemberdayaan	Persentase pelaksanaan								

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
1	02	05	Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Upaya Promotif dan Preventif		56,15%	100%	95,10%	95,10%	95%	69,13%	72,71%	
1	03	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Indeks Infrastruktur Kabupaten									
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		0,013	0,021	0,013	61,66%	0,021	0,013	61,66%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga		85,11%	90%	78,18%	86,87%	93%	82,80%	89,03%	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase prasarana pengolahan persampahan yang tersedia		32,16%	79,05%	70%	88,55%	88,51%	21,44%	21,22%	
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		37,33%	88,34%	83,12%	94,09%	92,22%	52,59%	75,03%	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase berfungsi Baik		21,62%	81,36%	90,99%	100%	83,79%	44,74%	53,40%	
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan/setapak berfungsi baik kawasan pemukiman		80,39%	61,77%	61,77%	100%	100%	74,18%	74,18%	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki persetujuan bangunan gedung		50,77%	61,60%	30,67%	49,79%	74,35%	44,07%	59,27%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah Lokasi yang ditetapkan rencana tata bangunan dan lingkungannya		29 lokasi	29 lokasi	29 lokasi	100%	29 lokasi	29 lokasi	100%	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten		72,07%	72,22%	63,69%	88,19%	91,24%	69,27%	75,92	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,57	1	0,57	57%	1	0,57	57%	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		68,35%	49,32%	80%	100%	66,22%	72,23%	100%	
1	04	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni yang aman dan Terjangkau									

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
			DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	cakupan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat		78,88%	100%	100%	100%	100%	85,92%	85,92%	DINAS PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Persentase Rumah Layak Huni yang aman dan Terjangkau		-	-	-	-	-	-	-	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan perencanaan kawasan permukiman		26,62%	18,13%	3,33%	18,37%	30,78%	28,29%	91,89%	
1	04	04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	luas Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan kabupaten yang ditangani		-	-	-	-	-	-	-	
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU		100%	87,90%	192%	100%	100%	100%	100%	
1	04	06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi Kecil									

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
1	05	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)									
				Indeks Ketahanan Daerah									
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan		50%	100%	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	SATPOL-PP
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana alam tuntas		46,55%	80%	96,83%	100%	90%	63,31%	70,34%	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap yang ditentukan		63,12%	100%	100%	100%	100%	75,41%	75,41%	DINAS DAMKAR
1	06	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Indeks Kesejahteraan Sosial									
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dan KAT yang diberdayakan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		69,33%	75%	75%	100%	75%	71,22%	71,22%	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		46,51%	81%	40,37%	49,84%	90%	44,46%	49,40%	DINAS SOSIAL
	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang tertangani Yang mandiri		41,50%	73,5%	75,23%	100%	75,8%	52,74%	69,58%	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		64,26%	100%	100%	100%	100%	76,17%	76,17%	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makan Pahlawan yang terpelihara		50%	100%	100%	100%	68%	66,67%	66,67%	
2	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)									
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga	Tingkat Produktifitas tenaga kerja		42,04%	15%	6,87%	45,80%	20%	30,32%	100%	DINAS TENAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
		Kerja									KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	32,50%	15%	24,78%	100%	20%	29,93%	100%	
2	07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus hubungan industrial yang diselesaikan	61,65%	19%	100%	100%	20,5%	74,43%	100%	
2	08 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)								
2	08 02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Focal Point yang terbentuk di Daerah	29,82%	30,64%	28,60%	93,34%	25,64%	29,41%	100%	DP2KBP3A
2	08 03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	3,33	2,75	0,00	0,00%	2,70	3,33	100%	
2	08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data gender dan anak	N/A	40%	N/A	N/A	60%	N/A	N/A	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai indikator kabupaten layak anak		260 point	500 point	398,94 point	79,79%	650 point	306,31 point	47,13%	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan yang ditangani		50,72%	40%	0%	0%	60%	33,81%	33,81%	
2	09	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan									
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Sarana pada Daerah Rawan Pangan		87,33%	100%	100%	100%	100%	91,55%	91,55%	DINAS KETAPANG
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Ketersediaan Pangan		82,18%	100%	100%	100%	100%	88,12%	88,12%	
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		82,18%	100%	100%	100%	100%	88,12%	88,12%	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang ditangani		56,43%	100%	100%	100%	100%	70,95%	70,95%	
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan		58,62%	100%	100%	100%	100%	72,41%	72,41%	
2	10	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pertanahan									

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan		63,23%	100%	130%	100%	100%	85,48%	85,48%	DINAS PERKIMTAN
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	presentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		78,65%	100%	180%	100%	100%	100%	100%	
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		2,27%	100%	80%	80%	100%	28,18%	28,18%	
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Luasan (ha) tanah kosong yang dinventarisasi dan dimanfaatkan		61,21%	100%	175%	100%	100%	99,14%	99,14%	
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yg telah diterbitkan izin		50%	100%	0,00%	0,00%	100%	33,33%	33,33%	
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase layanan penatagunaan tanah Dalam kurun waktu tertentu		92,27%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	
2	11	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan yang Disusun tepat Waktu, Tepat Proses, Tepat Isi	62,22%	100%	98,16%	98,16%	100%	74,20%	74,20%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50%	100%	41,72%	41,72%	100%	47,24%	47,24%	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60,63%	100%	91,90%	91,90%	100%	71,05%	71,05%	
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) yang dikendalikan	57,26%	100%	46,86%	46,86%	100%	53,79%	53,79%	
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan lingkungan terhadap izin lingkungan dan IPPLH yang diterbitkan	58,78%	100%	85,45%	85,45%	100%	67,67%	67,67%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
2	11	07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase data dan informasi MHA serta Jenis Kearifan Lokal yang di Akui	85,26%	100%	91,39%	91,39%	100%	87,30%	87,30%	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	58,22%	100%	82,55%	82,55%	100%	66,33%	66,33%	
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang memperoleh Penghargaan Lingkungan Hidup	50%	100%	62,40%	62,40%	100%	54,13%	54,13%	
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah	61,76%	100%	79,36%	79,36%	100%	67,63%	67,63%	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten	79,17%	93%	94,77%	100%	90%	84,37%	93,74%	
2	12	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Administrasi Kependudukan dan								

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
			PENCATATAN SIPIL	Pencatatan Sipil									
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik		91,22%	100%	80,29%	80,29%	100%	87,57%	87,57%	DISDUKCAPIL
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil		98,18%	100%	100%	100%	100%	98,78%	98,78%	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat keserasian database yang valid		88,06%	100%	100%	100%	100%	92,04%	92,04%	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Tingkat keserasian database yang valid		78,92%	100%	91,31%	91,31%	100%	83,05%	83,05%	
2	13	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Indeks Desa Membangun									
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan tata Kelola Desa Yang Baik		96,54%	100%	95.81%	95.81%	100%	96,30%	96,30%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar Desa		97,48%	100%	88,61%	88,61%	100%	91,19%	91,19%	
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib, Transparan dan Akuntabel		72,31%	100%	63.38%	63.38%	100%	82,66%	82,66%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga emasyarakatatan yang Aktif	77,44%	100%	94.13%	94.13%	100%	83,00%	83,00%	
2	14	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1,86%	2,15%	0%	0%	2,20 %	1,24%	56,36%	DP2KBP3A
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	59,32	62,92	65	100%	63,41	61,21	96,53%	
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,87%	15,50%	11,40%	73,55%	15%	11,71%	78,07%	
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera	35,92%	56%	28,89%	51,59%	80%	33,57%	41,97%	
2	15	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas								
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan	Tingkat Kelancaran Keamanan dan Keselamatan bagi	85,18%	99,60 %	95,02%	95,40%	100%	89,05%	89,05%	DINAS PERHUBUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
		Jalan (LLAJ)	Pengguna Jalan								AN
2	15	03 Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yg laik fungsi	75,72%	100%	96,80%	96,80%	100%	82,75%	82,75%	
2	16	00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)								
2	16	02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	89,32%	100%	100%	100%	76,16%	92,88%	100%	DKISP
2	16	03 Program Aplikasi Informatika	Presentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo	95,51%	100%	98,27%	98,27%	47,62%	96,43%	100%	
2	17	00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Koperasi								
			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro								
2	17	02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi	75,12%	20%	20%	100%	20%	44,75%	100%	DINAS KOPERASI DAN UMKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
				dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota									
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten		64,53%	47,62%	54.05%	100%	48,68%	61,04%	100%	
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		27,18%	20%	45%	100%	20%	33,12%	100%	
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		40,86%	39,68%	58.20 %	100%	40%	46,64%	100%	
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		51,44%	20%	78.84%	100%	10%	60,57%	100%	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		44,92%	1,28%	2.61%	100%	1,28%	30,81%	100%	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		29,61%	0,32%	0.2%	62,50%	100%	29,68%	29,68%	
2	18	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Banggai									
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Penanaman modal, Perizinan dan non perizinan									
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase peningkatan investasi di Kabupaten Banggai		61,82%	100%	100%	100%	100%	74,55%	74,55%	DPMPPTSP
ves	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Pameran Penanaman Modal		50%	100%	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		77%	100%	100%	100%	100%	84,67%	84,67%	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang taat melaporkan LKPM		81,73%	100%	100%	100%	100%	87,82%	87,82%	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Pemanfaatan IT untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan		93,47%	100%	100%	100%	100%	95,65%	95,65%	
2	19	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Indeks Kepemudaan									
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		72,82%	100%	90%	90%	100%	78,65%	78,65%	DINAS DISPORA
2	19	03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Sarana dan Prasarana Olah Raga yang Berstandarisasi		83,67%	100%	99,49%	99,49%	100%	88,94%	88,94%	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Jumlah Kegiatan pramuka yang difasilitasi		97,17%	100%	100%	100%	100%	98,11%	98,11%	
2	20	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		99,69%	100%	100%	100%	76,79%	99,79%	100%	DINAS KOMINFO
2	21	00	URUSAN PEMERINTAHAN										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
		BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	61,37%	100%	100%	100%	44,64%	74,24%	100%	DINAS KOMINFO
2	22	00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Indeks Kebudayaan Daerah								
2	22	02 Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah dikembangkan	67,60%	80%	35,20%	44,00%	70%	56,80%	81,14%	DINAS PENDIDIKAN
2	22	03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	67,26%	100%	58,52%	58,52%	100%	64,35%	64,35%	
2	22	04 Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Diinventarisasi dan Dibina	71,78%	100%	43,55%	43,55%	100%	62,37%	62,37%	
2	22	05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	61,79%	100%	23,58%	23,58%	100%	49,05%	49,05%	
2	22	06 Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan Permuseuman yang telah dikembangkan	63,13%	100%	26,25%	26,25%	100	50,83%	50,83%	
2	23	00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat								

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
			PERPUSTAKAAN										
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat									
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		72,60%	40%	90%	100%	60%	78,40%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan		56,27%	40%	100%	100%	60%	70,84%	100%	
2	24	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban		36%	40%	100%	100%	60%	57,33%	95,96%	DINAS PERPUSTAKAAN
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip statis sesuai NSPK		42%	40%	100%	100%	60%	61,80%	100	
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
3 00 00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 25 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten									
3 25 02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		11.275 Ton	24.200 Ton	29.028 Ton	100%	26.620 Ton	17.192,67 Ton	64,59%	DINAS PERIKANAN
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		2.598,69 Ton	1.573 Ton	6.401 Ton	100%	1.730 Ton	3.866,12 Ton	100%	
3 25 05	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi hasil olahan hasil perikanan yang sesuai SSOP dan GMP		9.790,50 Ton	20.570 Ton	24.100 Ton	100%	22.627 Ton	14.560,33 Ton	64,35%	
3 26 00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB									
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS PARIWISATA
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Produk Parawisata didalam dan Luar Negeri		50,17 %	100%	100%	100%	100%	66,78%	66,78%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61,43%	100%	99.54%	99.54%	100%	74,13%	74,13%	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepariwisata dan EKRAF	52,72%	100%	100%	100%	100%	68,48%	68,48%	
3	27	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Produktivitas tanaman pangan								
				Produktivitas tanaman hortikultura								
				Produktivitas tanaman perkebunan								
				Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan								
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase produksi daging	50%	8,13%	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	DINAS PETERNAKAN
				Tingkat pelaksanaan penggunaan sarana pertanian Sayuran, Tanaman Buah-buahan dan Tanaman Unggul perkebunan	50%	100%	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	DINAS TPHP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana peternakan yang digunakan		67,16%	100%	100%	100%	100%	78,10%	78,10%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase pemenuhan prasarana pertanian prapanen dan sarana pendukungnya		11,67%	30%	100%	100%	10%	41,11%	100%	DINAS TPHP
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/ ternak		57,27%	14,29%	100%	100%	100%	71,51%	71,51%	DINAS PETERNAKAN
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian dan penaggulangan bencana pertanian		22,71%	35%	100%	100%	25%	48,47%	100%	DINAS TPHP
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Jasa Usaha Peternakan		61,57%	20%	100%	100%	100%	74,38%	74,38%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian Kabupaten		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINAS TPHP
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh terhadap Kelompok Binaan/Peternak		26,26%	20%	100%	100%	100%	50,84%	50,84%	DINAS PETERNAKAN
				Persentase Pendampingan kepenyuluhan terhadap pelaksanaan intervensi kegiatan pemberdayaan		67,21%	100%	100%	100%	100%	78,14%	78,14%	DINAS TPHP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
				bagi petani									
3	29	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Presentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang memiliki Izin di Kabupaten		0%	100%	100%	100%	100%	33,33%	33,33%	DINAS PERINDAG
3	30	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kontribusi Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Banggai									
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin		83,87%	100%	100%	100%	100%	89,17%	89,17%	
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi yang tertata dan memadai		66,24%	100%	100%	100%	100%	77,49%	77,49%	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		68,12%	100%	100%	100%	100%	78,74%	78,74%	
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Produk yang diekspor		58,32%	100%	88%	88%	100%	68,21%	68,21%	
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)		52,65%	100%	100%	100%	100%	68,43%	68,43%	DINAS DAGRIN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
				bertanda tera sah yang berlaku									
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dikonsumsi/ digunakan oleh Masyarakat		0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	
3	31	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kontribusi IKM terhadap PDRB Kabupaten Banggai									
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase Zona kawasan Industri potensial yang telah direncanakan		50%	100%	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	DINAS DAGRIN
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri yang diproses sesuai SOP		50%	100%	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	
	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase industri yang teridentifikasi melalui SIINAS		34%	100%	100%	100%	100%	56%	56%	
3	32	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Presentase Transmigrasi yang Mandiri									
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang direncanakan		0%	15%	0%	0%	20%	0%	0%A	DINAS NAKERTRANS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Dilatih		45%	100%	90%	90%	100%	60%	60%	
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan		50%	100%	0%	0%	100%	33,33%	33,33%	
4	00	00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01	00	SEKRETARIAT DAERAH										
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		61,01%	100%	94,06%	94,06%	100%	72,03%	72,03%	SEKRETARIA T DAERAH
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi dan koordinasi peningkatan perkeonomian rakyat		60,81%	100%	100%	100%	100%	73,87%	73,87%	
4	01	04	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	02	00	SEKRETARIAT DPRD	Indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD									
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu, tepat tindak lanjut dan tepat sasaran		66,03%	100%	99,49%	99,49%	100%	77,18%	77,18%	SEKRETARIA T DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
5	00	00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01	00	PERENCANAAN	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah								
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	68,71%	100%	100%	100%	100%	79,14%	79,14%	BAPPEDA
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja PD Mitra Yang Di Susun Tepat Waktu, Tepat Proses Dan Tepat Isi	72,66%	100%	100%	100%	100%	81,77%	81,77%	
5	02	00	KEUANGAN	Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah								
				Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai								
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses, tepat isi	66,78%	100%	100%	100%	100%	77,85%	77,85%	BPKAD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
				Persentase Deviasi Proyeksi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain		58,77%	100%	90,45%	90,45%	100%	69,33%	69,33%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang milik Daerah Kab. Banggai yang memiliki Bukti Dokumen kepemilikan		96,77%	100%	100%	100%	100%	97,84%	97,84%	BPKAD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah		63,57%	100%	90,37%	90,37%	100%	72,50%	72,50%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03	00	KEPEGAWAIAN										
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kualitas data, layanan kepegawaian dan kinerja pegawai		74,79%	82,5%	87%	100%	86,2%	78,86%	91,48%	BKPSDM
5	04	00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kompetensi sumber daya aparatur		71,99%	80%	100%	100%	85%	81,33%	95,68%	BKPSDM
5	05	00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Indeks Inovasi Daerah									
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang diitindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		56,27%	100%	100%	100%	100%	70,85%	70,85%	BRIDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
6	00	00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01	00	INSPEKTORAT DAERAH	Maturitas APIP								
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	INSPEKTORAT
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	rata- rata nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	90%	100%	100%	100%	85%	93,33%	100%	
7	00	00	UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	00	KECAMATAN									
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		80%	100%	60%	60%	100%	73,33%	73,33%	KECAMATAN
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		77%	100%	54%	54%	100%	69,33%	69,33%	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		76%	100%	52%	52%	100%	68%	68%	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		80,50%	100%	61%	61%	100%	74%	74%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		76%	100%	52%	52%	100%	68%	68%	
8	00	00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01	00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Persentase Masyarakat yang faham dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik								
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	49,85%	100%	97,98%	87,98%	100%	65,89%	65,89%	BADAN KESATUAN BANGSA DA POLITIK
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	98,03%	100%	98,61%	98,61%	100%	98,22%	98,22%	
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kebudayaan dan kemasyarakatan yang aktif	25,47%	100%	78,93%	78,93%	100%	43,29%	43,29%	
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	32,82%	100%	68,07%	68,07%	100%	44,57%	44,57%	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu			Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024	
			Sosial, Dan Budaya										
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik		49,60%	100%	90,43%	90,43%	100%	63,21%	63,21%	

2.2 Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya.

Berdasarkan laporan realisasi semester Pertama APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.273.722.791.644,63 atau 40,22% dari Target pendapatan yang di tetapkan sebesar Rp3.166.684.508.284,00 sehingga sisa anggaran pendapatan sampai dengan semester pertama adalah Rp1.892.961.716.639,37 dengan capaian sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 (prognosis) di perkirakan sebesar Rp1.874.032.099.472,98 atau di perkirakan akan terealisasi sebesar 99,00%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp95.724.933.445,63 atau 37,79% dari Target PAD yang di tetapkan sebesar Rp253.313.354.132,00 sehingga sisa anggaran PAD sampai dengan semester pertama adalah Rp157.588.420.686,37 Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran di perkirakan sebesar Rp156.012.536.479,51 atau akan mencapai 99,00%. Sedangkan untuk pendapatan transfer, realisasi semester I sebesar Rp1.177.068.264.055,00 atau 40,79% dari Target Pendapatan Transfer yang di tetapkan sebesar Rp2.886.010.712.964,00 sehingga sisa anggaran transfer sampai dengan semester pertama adalah Rp1.708.942.448.909,00 Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran di perkirakan sebesar Rp1.691.853.024.419,91 atau akan mencapai 99,00%. Realisasi semeseter pertama Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp929.594.144,00 atau 3,40%. dari target Rp27.360.441.188,00 di perkirakan pada akhir tahun anggaran akan terealisasi sebesar Rp26.166.538.573,56 atau 99,00%.

Sedangkan untuk realisasi Belanja, sampai dengan semester I Tahun 2024 mencapai 34,39%, yaitu sebesar



Rp1.099.715.200.141,00 dari Rp3.197.563.400.064,00 yang di tetapkan dalam APBD 2024. Sehingga sisa anggaran belanja sampai dengan semester pertama adalah sebesar Rp2.097.848.199.923,00 Prognosis sampai dengan akhir tahun anggaran di perkirakan akan terealisasi sebesar Rp2.076.869.717.923,77 atau 99,00%. Realisasi masing-masing komponen belanja dapat di jelaskan yaitu Belanja Operasi sebesar Rp762.899.386.284,00 atau terealisasi 35,69%, Belanja Modal sebesar Rp125.429.692.896,00 atau terealisasi 19,60%.

Rincian lengkap Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024 Semester I dan Prognosis 6 (enam) Bulan berikutnya, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi APBD Kabupaten Banggai Tahun 2024 Semester I dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
1	2	3	4			
4	PENDAPATAN DAERAH	3.166.684.508.284,00	1.273.722.791.644,63	1.892.961.716.639,37	1.874.032.099.472,98	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	253.313.354.132,00	95.724.933.445,63	157.588.420.686,37	156.012.536.479,51	
4.1.01	Pajak Daerah	116.168.011.100,00	30.695.046.563,09	85.472.964.536,91	84.618.234.891,54	
4.1.02	Retribusi Daerah	27.282.576.950,00	8.382.526.472,55	18.900.050.477,45	18.711.049.972,68	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	-	2.600.000.000,00	2.574.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	107.262.766.082,00	56.647.360.409,99	50.615.405.672,01	50.109.251.615,29	
					-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.886.010.712.964,00	1.177.068.264.055,00	1.708.942.448.909,00	1.691.853.024.419,91	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.819.073.724.788,00	1.156.482.576.977,00	1.662.591.147.811,00	1.645.965.236.332,89	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.598.281.383.788,00	1.041.208.852.177,00	1.557.072.531.611,00	1.541.501.806.294,89	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.406.660.674.788,00	490.759.340.252,00	915.901.334.536,00	906.742.321.190,64	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	916.380.701.000,00	448.438.023.000,00	467.942.678.000,00	463.263.251.220,00	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.105.367.000,00	6.965.624.750,00	66.139.742.250,00	65.478.344.827,50	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	202.134.641.000,00	95.045.864.175,00	107.088.776.825,00	106.017.889.056,75	
4.2.01.05	Dana Desa	220.792.341.000,00	115.273.724.800,00	105.518.616.200,00	104.463.430.038,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.936.988.176,00	20.585.687.078,00	46.351.301.098,00	45.887.788.087,02	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.516.988.176,00	20.585.687.078,00	43.931.301.098,00	43.491.988.087,02	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.420.000.000,00	-	2.420.000.000,00	2.395.800.000,00	
					-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.360.441.188,00	929.594.144,00	26.430.847.044,00	26.166.538.573,56	
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.515.559.000,00	929.594.144,00	1.585.964.856,00	1.570.105.207,44	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.844.882.188,00	-	24.844.882.188,00	24.596.433.366,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
1	2	3	4			
5	BELANJA DAERAH	3.197.563.400.064,00	1.099.715.200.141,00	2.097.848.199.923,00	2.076.869.717.923,77	
5.1	BELANJA OPERASI	2.137.396.233.798,00	762.899.386.284,00	1.374.496.847.514,00	1.360.751.879.038,86	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.049.065.642.013,00	415.135.473.638,00	633.930.168.375,00	627.590.866.691,25	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.489.312.909,00	268.394.238.051,00	692.095.074.858,00	685.174.124.109,42	
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	403.884.960,00	115.040,00	113.889,60	
5.1.05	Belanja Hibah	122.323.078.281,00	78.965.789.635,00	43.357.288.646,00	42.923.715.759,54	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.114.200.595,00	-	5.114.200.595,00	5.063.058.589,05	
5.2	BELANJA MODAL	639.971.274.861,00	125.429.692.896,00	514.541.581.965,00	509.396.166.145,35	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.430.000.000,00	-	3.430.000.000,00	3.395.700.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.134.685.276,00	55.437.349.244,00	85.697.336.032,00	84.840.362.671,68	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.460.104.020,00	14.768.589.802,00	198.691.514.218,00	196.704.599.075,82	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	281.131.485.565,00	55.208.753.850,00	225.922.731.715,00	223.663.504.397,85	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.000.000,00	15.000.000,00	245.000.000,00	242.550.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	555.000.000,00	-	555.000.000,00	549.450.000,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.284.301.600,00	10.000.000,00	11.274.301.600,00	11.161.558.584,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.284.301.600,00	10.000.000,00	11.274.301.600,00	11.161.558.584,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	408.911.589.805,00	211.376.120.961,00	197.535.468.844,00	195.560.114.155,56	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,00	6.995.479.602,00	7.349.579.203,00	7.276.083.410,97	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.566.531.000,00	204.380.641.359,00	190.185.889.641,00	188.284.030.744,59	
	SURPLUS/DEFISIT	(30.878.891.780,00)	174.007.591.503,63	(204.886.483.283,63)	(202.837.618.450,79)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	30.878.891.780,00	-	30.878.891.780,00	30.570.102.862,20	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.605.000.000,00	-	44.605.000.000,00	44.158.950.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.605.000.000,00	-	43.605.000.000,00	43.168.950.000,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	990.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.726.108.220,00	-	13.726.108.220,00	13.588.847.137,80	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.726.108.220,00	-	12.726.108.220,00	12.598.847.137,80	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	990.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	174.007.591.503,63	(174.007.591.503,63)	(172.267.515.588,59)	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022, target tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 mengikuti kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan di fokuskan pada upaya peningkatan kapasitas produksi perekonomian menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 di harapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 7,0-8,0%. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari sektor industri



pengolahan, sektor perdagangan yang tumbuh pra pandemi, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian. Terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga menjadi tantangan ke depan, dan ini harus diperhatikan supaya tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani *secondary market*, terutama untuk SBN.

Searah dengan kebijakan ekonomi nasional diatas, Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2023 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan kawasan food estate, ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan covid-19 dan variannya dan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018 disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun-tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan



ekonomi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,86 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi Covid 19. Peningkatan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Di perkirakan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai akan terus membaik dan tumbuh positif di kisaran 2-5%. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi andil sektor- sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah yang menunjukkan perbaikan selama tahun 2023 ini. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2023

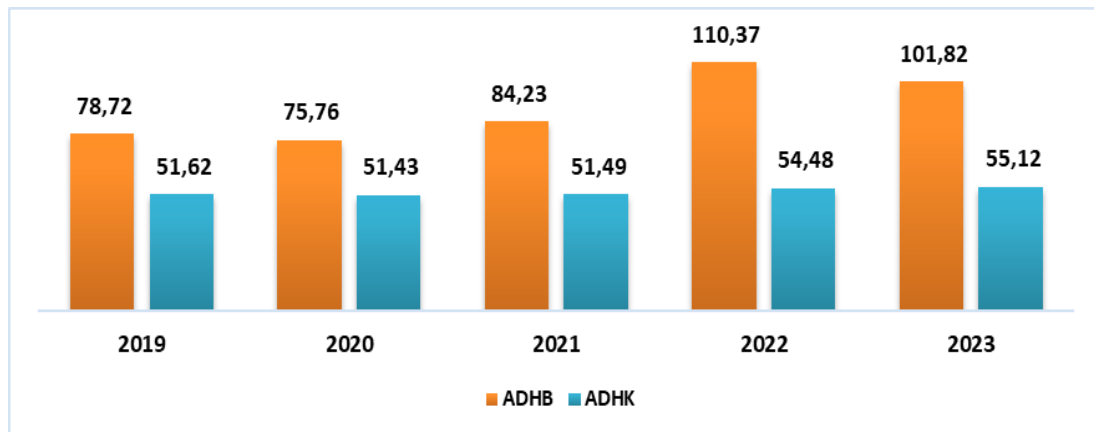
a. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 38,05 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 40,76 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 20,14 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 20,62 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 2,40 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di

sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 3.1
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banggai (Juta Rupiah)
Tahun 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2024

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,18 persen (angka ini meningkat dari 26,48 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 19,01 persen (menurun dari 22,73 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,59 persen (menurun dari 22,02 persen di tahun 2019). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing-masing kurang dari 10 persen.

Tabel 3.1
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,02	23,38	22,53	18,52	21,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	22,73	22,92	22,12	21,61	19,01
3.	Industri Pengolahan	26,48	24,29	26,87	36,42	32,18
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
6.	Konstruksi	8,08	7,87	7,38	5,96	6,92
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,98	5,16	5,07	4,37	5,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,02	2,19	2,22	2,14	2,54
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,30	0,32	0,27	0,33
10.	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,58	2,60	2,09	2,36
11.	Jasa Keuangan	1,57	1,90	1,96	1,56	1,70
12.	Real Estate	1,42	1,56	1,42	1,18	1,43
13.	Jasa Perusahaan	0,09	0,10	0,09	0,07	0,08
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,44	3,83	3,68	2,88	3,27
15.	Jasa Pendidikan	2,42	2,58	2,43	1,87	2,13
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,67	0,79	0,78	0,63	0,74
17.	Jasa Lainnya	0,46	0,50	0,47	0,38	0,44

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Besarnya kontribusi Industri Pengolahan di sektor PDRB Kabupaten Banggai ini sebagian besar disokong oleh pengilangan minyak dan gas yang berupa LNG (59,48%) dan industri kimia berupa Amonia (15,39%). Selain itu terdapat industri makanan yang mempunyai kontribusi 10,58 persen terhadap Industri Pengolahan yang sebagian besar berupa industri kopra dan minyak sawit.



Kontributor terbesar ketiga pada PDRB Kabupaten Banggai yaitu Pertambangan dan penggalan. Sektor ini sebagian besar disokong oleh pertambangan migas yang dilakukan oleh Pertamina Job Tomori. Selain itu subsektor pertambangan bijih logam menjadi penyokong terbesar kedua pada sektor ini. Sub sektor pertambangan bijih logam menyumbang 20,73 persen pada sektor Penggalan dan pertambangan.

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pertambangan dan Penggalan serta Industri Pengolahan peranannya menurun. Salah meningkatnya satu peranan penyebab Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah meningkatnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Penurunan harga sampai 50% pada komoditas Industri Migas dan Industri Kimia juga menjadi pendorong penurunan kontribusi dari kedua sektor tersebut.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P),

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2019 – 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2
PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran
Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	11.122,45	10.867,97	11.480,67	12.471,47	13.372,50
Konsumsi LNPRT	470,07	462,53	491,56	567,34	649,68
Konsumsi Pemerintah	2.873,50	2.877,06	3.111,22	3.212,15	3.337,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12.437,56	7.356,92	7.924,07	8.408,11	17.360,13
Perubahan Inventori	-61,76	199,67	217,57	238,07	231,95
Net Eksport Barang dan Jasa	2.686,11	5.596,73	7.517,57	15.907,07	11.525,83
PDRB	29.527,93	27.360,88	30.825,09	40.776,13	38.047,96

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2019–2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
Pengeluaran Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	6.749,72	6.460,07	6.632,83	6.903,15	7.186,67
Konsumsi LNPRT	283,55	274,57	277,88	304,12	328,04
Konsumsi Pemerintah	1.518,66	1.442,46	1.503,06	1.515,17	1.525,02
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.295,77	4.323,07	4.507,51	4.646,07	4.699,26
Perubahan Inventori	-23,15	137,50	145,25	151,13	134,22
Net Eksport Barang dan Jasa	3.626,05	5.897,87	5.779,07	6.660,03	6.749,46
PDRB	19.450,60	18.517,22	18.840,59	20.139,75	20.622,67

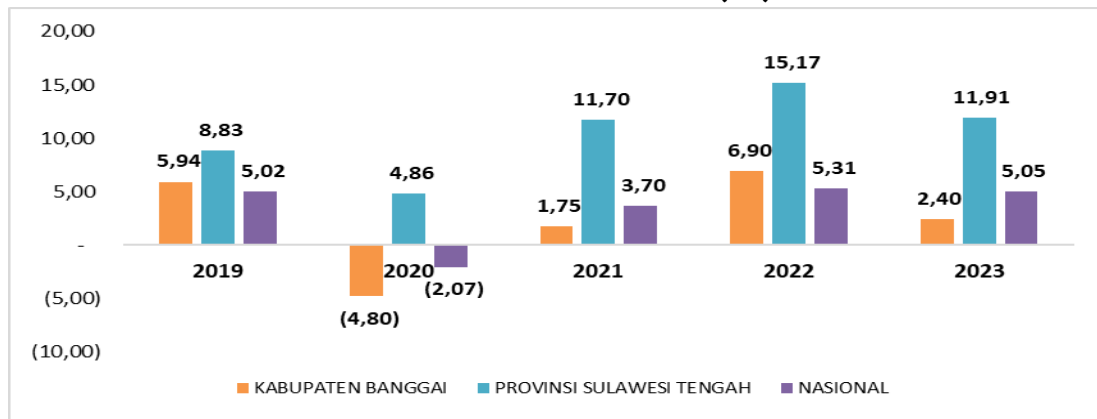
Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 20,62 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 20,14 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,40 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,90 persen.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai
Tahun 2019 – 2023 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -4,80 persen, yang utamanya diakibatkan karena dampak pandemi COVID-19. Berlanjut pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 1,75 persen. pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat drastis menjadi 7,01 persen dan di tahun 2023 menurun menjadi 2,40 persen.

Sumber Utama Pertumbuhan ekonomi selama 2023 adalah peningkatan produksi di kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Perdagangan. Selain kedua kategori tersebut, menyebabkan pertumbuhan yang juga peningkatan perekonomian Kabupaten Banggai pada tahun 2023 adalah peningkatan pada kategori Pertambangan dan Penggalan, konstruksi, serta pengadaan listrik dan gas.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan minum. Salah satu

penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut adalah berakhirnya pandemi COVID-19 serta PPKM di Kabupaten Banggai yang menyebabkan bertambahnya event-event yang diadakan di Kabupaten Banggai.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2019 – 2023

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	-2,66	3,58	1,55	3,35
2	Pertambangan dan Penggalian	10,15	1,36	-0,44	9,99	1,14
3	Industri Pengolahan	3,75	-10,77	-2,35	11,83	0,72
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,02	5,09	3,68	10,00	6,69
5.	Pengadaan Air	-2,17	4,21	6,01	3,30	3,04
6.	Konstruksi	10,10	-13,16	3,80	1,83	2,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,49	-6,23	9,10	8,18	7,16
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,29	-33,90	10,92	14,54	5,59
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,75	-14,53	15,13	10,01	8,25
10.	Informasi dan Komunikasi	5,50	7,73	11,83	6,08	5,72
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	12,10	9,83	-3,68	0,37
12.	Real Estate	0,90	0,03	1,33	7,24	5,72
13.	Jasa Perusahaan	5,76	-1,82	3,60	5,42	4,95
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,12	1,77	5,96	0,02	2,58
15.	Jasa Pendidikan	3,66	-2,77	5,61	0,22	4,88
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,39	5,64	3,01	2,90	6,66
17.	Jasa Lainnya	2,31	-0,01	6,05	4,39	5,27
	P D R B	5,94	-4,80	1,75	6,90	2,40

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

c. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19 dan pada tahun 2023 karena terjadinya penurunan produksi.

Migas dan Amonia yang menjadi contributor terbesar dalam PDRB kabupaten Banggai. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 78,36 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,69 juta rupiah kemudian naik di tahun 2021 hingga senilai 84,30 juta rupiah, dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 110,26 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh faktor inflasi. Kemudian Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 8,4 juta rupiah dikarenakan turunnya harga Migas dan Amonia yang menjadi komoditas utama.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Banggai mengalami peningkatan sekitar 0,71 juta rupiah atau hanya sekitar 1,31% dari tahun lalu.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku Gambaran perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2019-2023, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023

Tahun/Year	2019	2020	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHB/ at current price	29,528	27,361	30,825	40,766	38,048
- ADHK/ at 2010 Constant Price	19,451	18,517	18,841	20,140	20,623
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	78,363	75,679	84,300	110,262	101,817
- ADHK/ at 2010 Constant Price	51,619	51,218	51,525	54,473	55,187
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4.39	-0.78	0.60	5.72	1.31
Jumlah Penduduk (Ribu Orang) / Population (Thousand People)	376.81	361.54	365.66	369.72	373.69
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1.48	-4.05	1.14	1.11	1.07

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

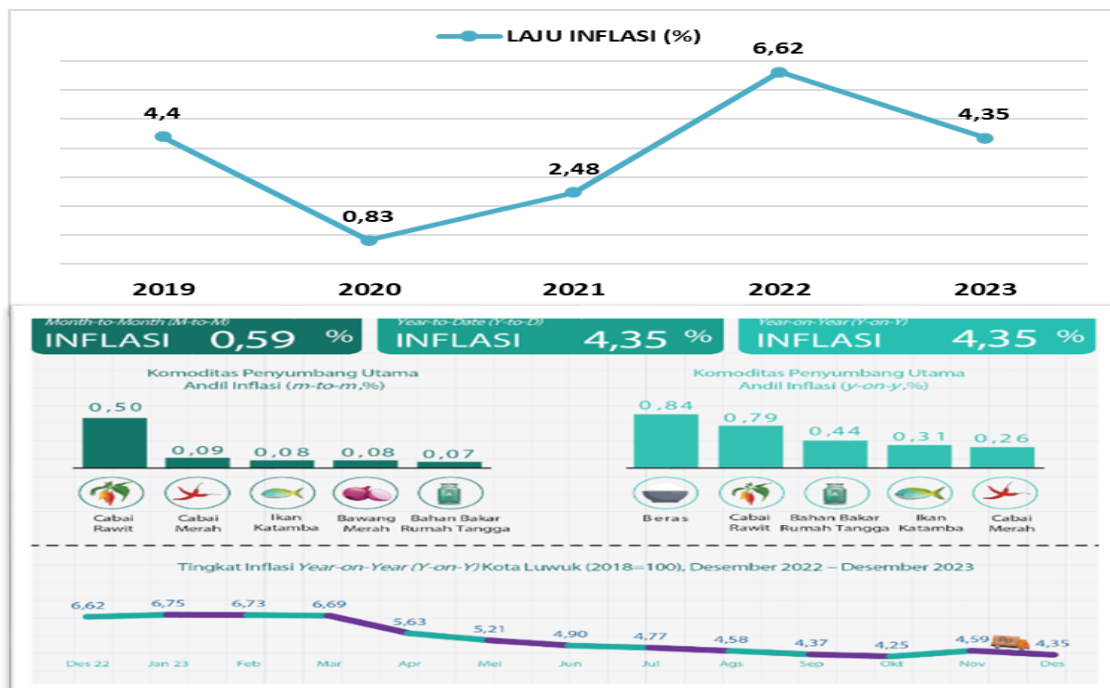
d. Inflasi

Angka inflasi merupakan tolak ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada bulan Desember 2023 Inflasi kota Luwuk adalah sebesar 4,35 persen, sementara inflasi tahun kalender dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 persen dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 persen.

Komoditas Penyumbang Utama Andil Inflasi (Year On Year) Kota Luwuk pada bulan Desember 2023 yaitu Beras (0,84%), Cabai Rawit (0,79%), Bahan Bakar Rumah Tangga (0,44%), Ikan Katamba (0,31%), Cabai Merah (0,26%).

Inflasi tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Sumenep sebesar 5,08 persen dan terendah di Kota Bandung sebesar 0,63 persen. Sedangkan Kota Luwuk berada di urutan ke-4 inflasi tertinggi di tingkat Nasional.

Gambar 3.3
Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

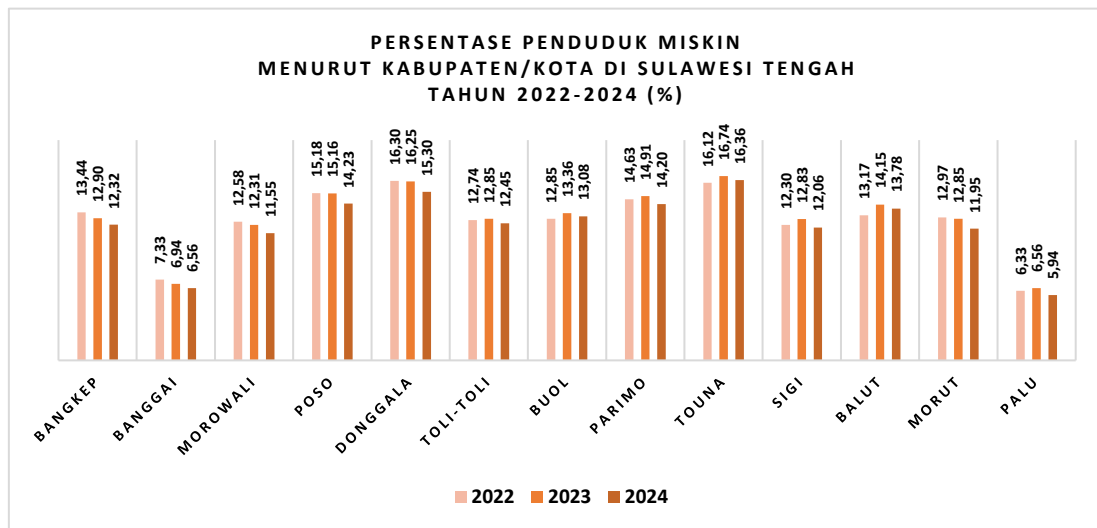
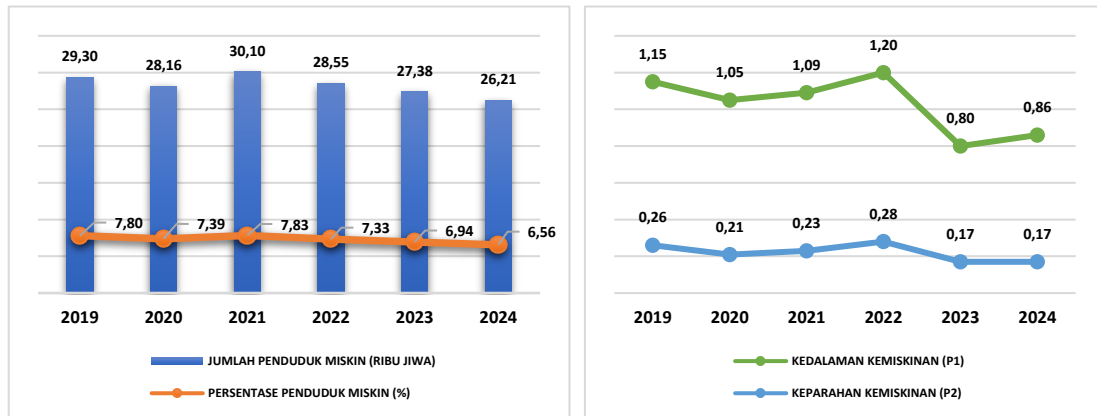
e. Kemiskinan

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan disuatu daerah.

Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Banggai.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 7,80% atau 29,30 ribu jiwa, di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28,16 ribu jiwa, di tahun 2021 kemiskinan kabupaten Banggai meningkat menjadi 7,83% atau 30,10 ribu jiwa dan terus menurun di tahun 2022 menjadi 7,33% atau 28,55 ribu jiwa, di tahun 2023 menjadi 6,94% atau 27,38 ribu jiwa dan di tahun 2024 turun menjadi 6,56 atau 26,21 ribu jiwa. Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya Kabupaten disulawesi tengah yang mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen.

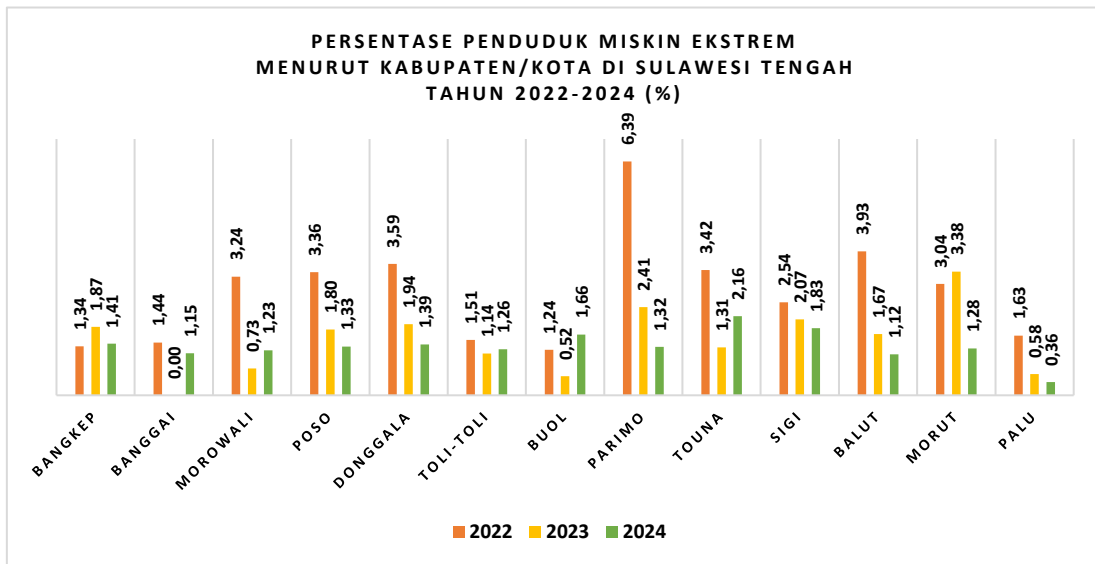
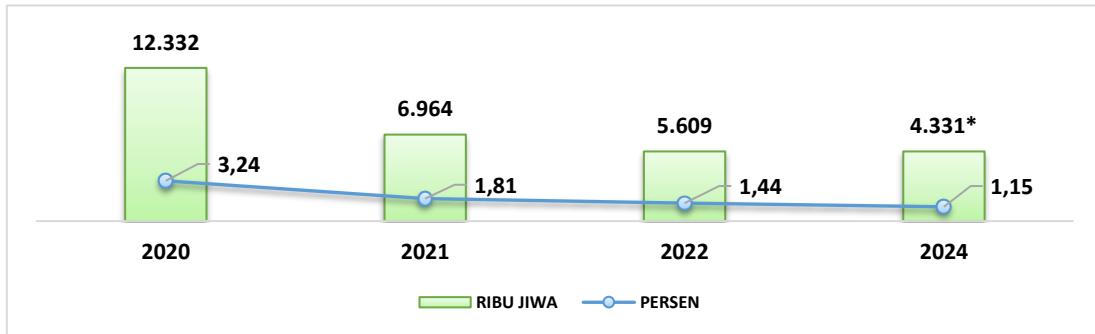
Gambar 3.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2019–2024



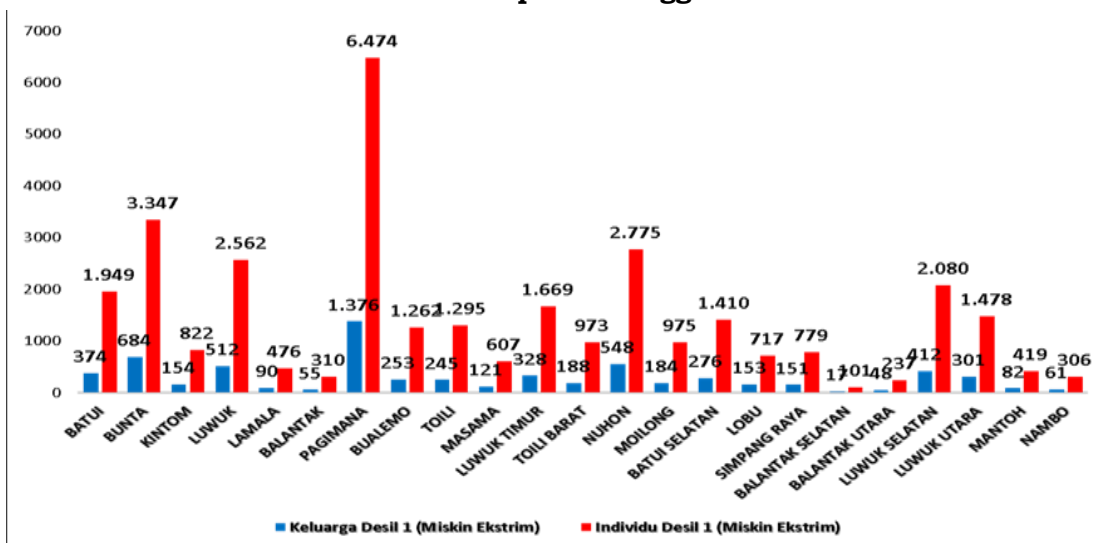
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Selanjutnya jumlah penduduk miskin ekstrem dari 6.964 Jiwa pada tahun 2021 menjadi 5.609 Jiwa tahun 2022, kemudian turun menjadi 4.331 Jiwa pada tahun 2024. Berdasarkan data P3KE 2021, Keluarga dan Individu Miskin Desil 1 tertinggi berada di Kecamatan Pagimana sejumlah 1.374 KK atau 6.474 jiwa.

Gambar 3.5
Angka Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Banggai
Tahun 2020 – 2024



Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Keluarga dan Individu Desil 1 Kabupaten Banggai Tahun 2021

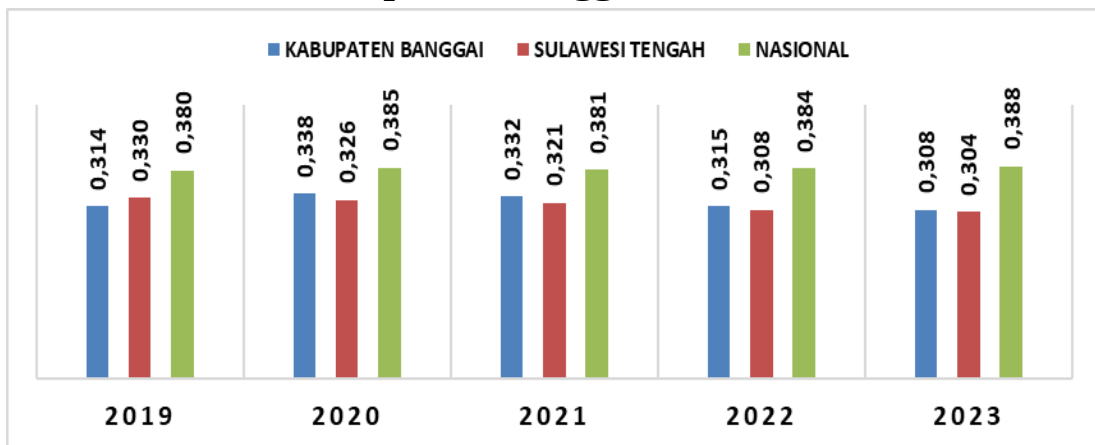


Sumber: BPS, P3KE, diolah Bappeda Kabupaten Banggai, 2023

f. Gini Rasio

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2023 kembali menurun seiring dengan berkurangnya angka kemiskinan yaitu menjadi sebesar 0,308 point dari tahun sebelumnya sebesar 0,315 point.

Gambar 3.6
Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2019 – 2023



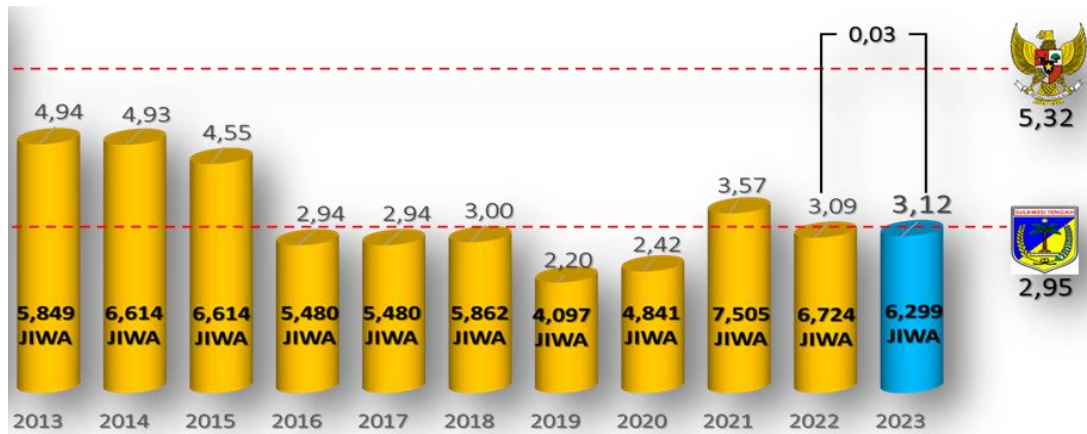
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (data di olah)

g. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen yaitu 3,12 persen di bandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,09 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,93 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 sebesar 71,70 persen, dengan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 201,86 ribu orang. TPAK pada Agustus 2023 turun 1,78 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai
Tahun 2013 – 2023

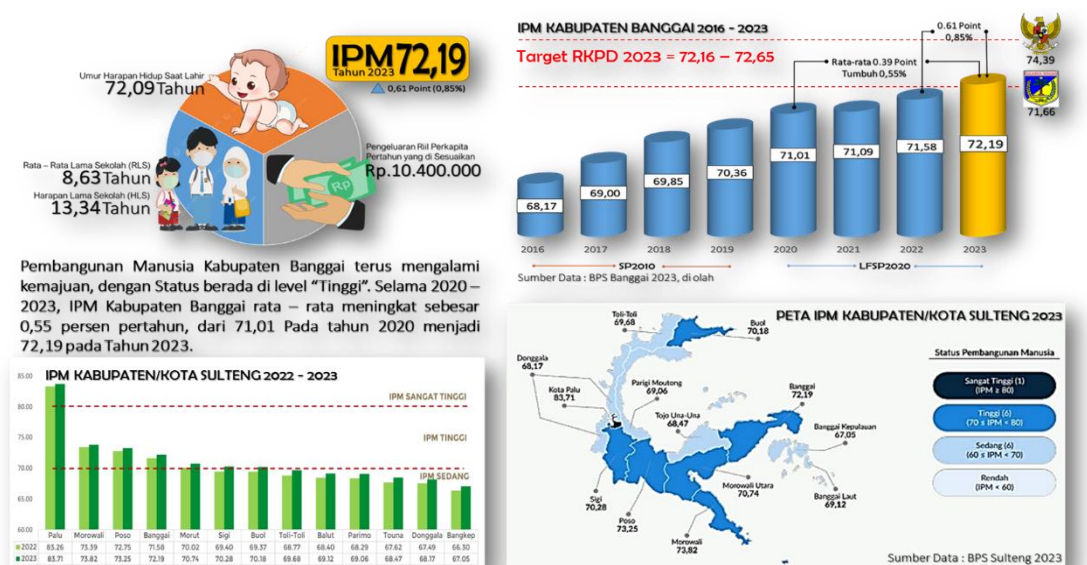


Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2023 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu 72,19 Point.

Gambar 3.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai
Tahun 2016 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2024

3.1.1.2 Perkiraan Tahun 2024

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2023 sebagaimana di uraikan di atas, dan mencermati perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, maka perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Banggai Tahun 2023 dapat digambarkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di harapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 7,0-8,0%, hal ini didorong oleh meningkatnya perkembangan sektor industri dan pengolahan, pertambangan dan penggalian, pariwisata, konstruksi, pertanian dan perikanan.
2. Inflasi diperkirakan akan tetap stabil dan terkendali dengan rata-rata sebesar 3-4% per tahun, walaupun terdapat beberapa faktor yang berpengaruh seperti harga bahan makanan atau perubahan nilai tukar mata uang.
3. Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran terus memperlihatkan trend peningkatan. Pencabutan status pandemic covid 19 oleh presiden memberikan optimisme, keyakinan, kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya. Kondisi ini di harapkan dapat berdampak terhadap meningkatnya kembali pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di maksud.
4. Tingkat kemiskinan di perkirakan akan menurun, begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka akibat adanya aktivitas ekonomi yang telah berjalan baik serta

kebijakan pemerintah melalui upaya pemulihan ekonomi dan stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya di perluas sebagai bentuk *social safety net*, angka kemiskinan dan pengangguran dapat tetap di jaga sesuai yang di targetkan.

5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di harapkan berdampak pada IPM, utamanya pada komponen pengeluaran perkapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Diperkirakan pendapatan masyarakat terus membaik, sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan asumsi – asumsi diatas, di proyeksikan perubahan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Indikator Makro
Kabupaten Banggai Tahun 2024

NO.	Indikator Ekonomi	Capaian 2023	Target RKPD Banggai 2024	Target Provinsi Untuk Banggai 2024	Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,40	4,61 – 4,82	4,35 – 5,37	4,35 – 5,37
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,12	2,18 – 2,26	2,00 – 2,50	2,50 - 3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,94	5,59 – 5,85	5,59 – 6,08	6,08 - 6,56
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,308	0,287 – 0,300	0,250 – 0,300	0,250 – 0,300
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,19	72,63 – 73,37	72,65 – 73,53	72,65 – 73,53
6.	Inflasi (%)	4,35	2,04	3,79	3,00 – 5,00

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024

Arah Kebijakan Keuangan daerah, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan agar seluruh sumber keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 192 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku maka untuk tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Banggai mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Pada perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024, kebijakan keuangan daerah mengacu pada kondisi sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tahun berjalan atas implementasi kebijakan keuangan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 sampai dengan pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2024;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penyesuaian Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.4.1/768/Dispota tanggal 18 Desember 2023 tentang

Penetapan Tuan Rumah POPDA PRA POPNAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

4. Penyesuaian Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3.4.1 Tahun 2024 tentang Lokasi Penyelenggaraan Kejuaraan Antar Kampung Tahun Anggaran 2024.
5. Keadaan Darurat; dan
6. Keadaan Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kebijakan

keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis terhadap realisasi APBD TA 2023, proyeksi RKPD Tahun 2024, Penetapan APBD TA 2024, maka di proyeksikan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.230.823.961.598,46	2.378.490.981.719,00	3.166.684.508.284,00	3.173.884.508.284,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.708.629.206,46	245.733.354.132,00	253.313.354.132,00	253.313.354.132,00,00
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	68.234.304.590,22	108.168.011.100,00	116.168.011.100,00	108.798.011.100,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	20.613.323.673,00	22.320.076.950,00	27.282.576.950,00	27.282.576.950,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.146.756.659,24	112.645.266.082,00	107.262.766.082,00	114.632.766.082,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.989.093.514.152,00	2.105.350.162.399,00	2.886.010.712.964,00	2.893.210.712.964,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.918.463.791.590,00	2.036.849.058.950,00	2.819.073.724.788,00	2.826.073.724.788,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.629.722.562,00	68.501.103.449,00	66.936.988.176,00	67.136.988.176,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.021.818.240,00	27.407.465.188,00	27.360.441.188,00	27.360.441.188,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	5.641.246.503,00	2.562.583.000,00	2.515.559.000,00	2.515.559.000,00
4 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
4 3 02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	20.380.571.737,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00
5	BELANJA	2.265.725.786.265,00	2.414.364.873.499,00	3.197.563.400.064,00	3.362.418.241.928,00
5 1	BELANJA OPERASI	1.524.298.084.652,00	1.688.437.884.566,00	2.137.396.233.798,00	2.206.155.417.089,00
5 1 01	Belanja Pegawai	788.420.959.811,00	918.783.014.495,00	1.049.065.642.013,00	1.042.605.961.612,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	660.846.991.937,00	662.894.209.865,00	960.489.312.909,00	1.023.289.427.699,00
5 1 04	Belanja Subsidi	403.713.720,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	70.429.899.184,00	104.561.750.206,00	122.323.078.281,00	134.805.327.673,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	4.196.520.000,00	1.794.910.000,00	5.114.200.595,00	5.050.700.105,00
5 2	BELANJA MODAL	358.294.493.742,00	348.481.651.384,00	639.971.274.861,00	729.066.933.434,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	540.059.109,00	0,00	3.430.000.000,00	7.030.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.321.380.286,00	66.422.002.135,00	141.134.685.276,00	203.588.790.808,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.451.609.928,00	174.273.055.588,00	213.460.104.020,00	216.258.062.626,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	133.597.972.919,00	105.781.053.661,00	281.131.485.565,00	301.519.430.000,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.471.500,00	635.540.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.000.000,00	1.370.000.000,00	555.000.000,00	410.650.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.375.540.000,00	3.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.375.540.000,00	3.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	381.757.667.871,00	373.945.337.549,00	408.911.589.805,00	408.911.589.805,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.943.866.569,00	12.949.838.249,00	14.345.058.805,00	14.345.058.805,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	368.813.801.302,00	360.995.499.300,00	394.566.531.000,00	401.566.531.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(34.901.824.666,54)	(35.873.891.780,00)	(30.878.891.780,00)	(188.533.733.644,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	229.692.495.558,00	35.873.891.780,00	30.878.891.780,00	188.533.733.644,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	238.318.603.778,00	44.500.000.000,00	44.605.000.000,00	202.259.841.864,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.318.603.778,00	43.500.000.000,00	43.605.000.000,00	201.259.841.864,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.626.108.220,00	8.626.108.220,00	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	7.626.108.220,00	7.626.108.220,00	12.726.108.220,00	12.726.108.220,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi :

a. Pajak Daerah yaitu :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
- 2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak

b. Retribusi daerah yaitu Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD.

d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan PD terkait terkait optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan obyek lainnya.
- 2) Koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro

e. Untuk optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Banggai telah mempunyai SDM yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan pemungutan PAD sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah telah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan untuk mengetahui realisasi capaian pendapatan setiap bulan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Terhadap pendapatan transfer ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah jenis penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah



yang dipisahkan atau dana perimbangan. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari berbagai macam penerimaan yang tidak terklasifikasi dalam kategori utama lainnya, seperti pendapatan dari penjualan atau sewa asset daerah yang tidak digunakan. Pendapatan ini juga berasal dari sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah memperluas basis pendapatan daerah sehingga dapat lebih fleksibel dalam membiayai kebutuhan Pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan daerah Kabupaten Banggai meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 di lakukan dengan memperhatikan penyesuaian pada pendapatan asli daerah yang meliputi target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan potensi nyata di objek penerimaan pendapatan.

Berdasarkan perubahan arah kebijakan tersebut di atas, pendapatan daerah tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp3.166.684.508.284,00 secara total tidak mengalami perubahan, namun dalam komponen Pendapatan

Asli Daerah ada penyesuaian target pada komponen pajak daerah yang semula sebesar Rp116.168.011.100,00 menjadi sebesar Rp108.798.011.100,00 yaitu pada :

1. Pajak Restoran semula sebesar Rp19.614.375.000,00 berkurang sebesar Rp 2.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp17.614.375.000,00 ;
2. Pajak Penerangan Jalan terjadi penyesuaian sebesar Rp 500.000.000,00
3. Pajak Sarang Burung Walet berkurang sebesar Rp125.000.000,00 dari target semula sebesar Rp150.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp25.000.000,00
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), semula sebesar Rp14.490.292.950,00 berkurang sebesar Rp4.745.000.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp 9.745.292.950,00 ;

Selanjutnya pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penambahan sebesar Rp7.370.000.000,00 dari target sebesar Rp107.262.766.082,00 menjadi sebesar Rp114.632.766.082,00 atas penyesuaian target pada komponen Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bertambah sebesar Rp4.370.000.000,00 dari target semula sebesar Rp2.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.870.000.000,00 ;
2. Pendapatan dan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang semula sebesar Rp934.661.917,00 bertambah sebesar

Rp3.000.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.934.661.917,00.

Rincian Pendapatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan
Pendapatan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.230.823.961.598,46	2.378.490.981.719,00	3.166.684.508.284,00	3.173.884.508.284,00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.708.629.206,46	245.733.354.132,00	253.313.354.132,00	253.313.354.132,00,00
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	68.234.304.590,22	108.168.011.100,00	116.168.011.100,00	108.798.011.100,00
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	20.613.323.673,00	22.320.076.950,00	27.282.576.950,00	27.282.576.950,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.146.756.659,24	112.645.266.082,00	107.262.766.082,00	114.632.766.082,00
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.989.093.514.152,00	2.105.350.162.399,00	2.886.010.712.964,00	2.893.210.712.964,00
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.918.463.791.590,00	2.036.849.058.950,00	2.819.073.724.788,00	2.826.073.724.788,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.629.722.562,00	68.501.103.449,00	66.936.988.176,00	67.136.988.176,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.021.818.240,00	27.407.465.188,00	27.360.441.188,00	27.360.441.188,00
4 3 01	Pendapatan Hibah	5.641.246.503,00	2.562.583.000,00	2.515.559.000,00	2.515.559.000,00
4 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	20.380.571.737,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00	24.844.882.188,00

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

Dalam RKPD Tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Banggai diproyeksikan sebesar Rp2.378.490.981.719,00, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp245.733.354.132,00, pendapatan transfer sebesar Rp2.105.350.162.399,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp27.404.465.188,00. Sementara itu dalam penetapan APBD Tahun 2024, pendapatan daerah ditetapkan sebesar

Rp3.166.684.508.284,00, dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp253.313.354.132,00, pendapatan transfer sebesar Rp2.886.010.712.964,00 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp27.360.441.188,00.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah terealisasi 40,22%. Realisasi terbesar adalah pada komponen Pendapatan Transfer 40,79% atau Rp1.177.068.264.055,00. Selanjutnya pada komponen Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp95.724.933.445,63 atau 37,79%, dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi Rp929.594.144,00 atau 3,40%.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat



diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung penguatan daya saing SDM dan pelayanan publik prima” diprioritaskan untuk:

1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
4. Ketahanan Pangan Daerah.
5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
8. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Belanja Daerah memperhatikan hal-hal khusus lain, sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Jumlah alokasi anggaran fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp679.905.142.804,00 atau 20,26%;
2. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting. Jumlah alokasi anggaran fungsi kesehatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp522.090.741.492,00,- atau 19,55%;
3. Mengalokasikan belanja Infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau dana desa sebagai upaya peningkatan bidang infrastruktur. Jumlah alokasi anggaran bidang infrastruktur sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp709.771.919.456,00,- atau 24,09%;
4. Mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebesar 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah

DAU tambahan. Jumlah alokasi anggaran kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah sebesar Rp29.900.000.000,00,- atau 0,89% ;

5. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal;

Kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni (semester satu) dan penyesuaian belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan. Perubahan kebijakan belanja pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas, proyeksi total belanja perubahan sebesar Rp3.362.418.241.928,00 naik sebesar Rp164.854.841.864,00 dari belanja daerah pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.197.563.400.064,00. Secara rinci perubahan rencana target belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
5	BELANJA	2.265.725.786.265,00	2.414.364.873.499,00	3.197.563.400.064,00	3.362.418.241.928,00
5 1	BELANJA OPERASI	1.524.298.084.652,00	1.688.437.884.566,00	2.137.396.233.798,00	2.206.155.417.089,00
5 1 01	Belanja Pegawai	788.420.959.811,00	918.783.014.495,00	1.049.065.642.013,00	1.042.605.961.612,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	660.846.991.937,00	662.894.209.865,00	960.489.312.909,00	1.023.289.427.699,00
5 1 04	Belanja Subsidi	403.713.720,00	404.000.000,00	404.000.000,00	404.000.000,00
5 1 05	Belanja Hibah	70.429.899.184,00	104.561.750.206,00	122.323.078.281,00	134.805.327.673,00
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	4.196.520.000,00	1.794.910.000,00	5.114.200.595,00	5.050.700.105,00
5 2	BELANJA MODAL	358.294.493.742,00	348.481.651.384,00	639.971.274.861,00	729.066.933.434,00
5 2 01	Belanja Modal Tanah	540.059.109,00	0,00	3.430.000.000,00	7.030.000.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.321.380.286,00	66.422.002.135,00	141.134.685.276,00	203.588.790.808,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.451.609.928,00	174.273.055.588,00	213.460.104.020,00	216.258.062.626,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	133.597.972.919,00	105.781.053.661,00	281.131.485.565,00	301.519.430.000,00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.471.500,00	635.540.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.000.000,00	1.370.000.000,00	555.000.000,00	410.650.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.375.540.000,00	3.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.375.540.000,00	3.500.000.000,00	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00
5.4	BELANJA TRANSFER	381.757.667.871,00	373.945.337.549,00	408.911.589.805,00	408.911.589.805,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.943.866.569,00	12.949.838.249,00	14.345.058.805,00	14.345.058.805,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	368.813.801.302,00	360.995.499.300,00	394.566.531.000,00	401.566.531.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(34.901.824.666,54)	(35.873.891.780,00)	(30.878.891.780,00)	(188.533.733.644,00)

Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Banggai Tahun 2024 diperoleh dari SILPA dan diarahkan untuk penempatan modal/penyertaan modal bagi badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Target Perubahan
Pembiayaan Daerah Tahun 2024 (Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD 2023	RKPD Tahun 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan APBD 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH	229.692.495.558,00	35.873.891.780,00	30.878.891.780,00	188.533.733.644,00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	238.318.603.778,00	44.500.000.000,00	44.605.000.000,00	202.259.841.864,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.318.603.778,00	43.500.000.000,00	43.605.000.000,00	201.259.841.864,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.626.108.220,00	8.626.108.220,00	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pmda	7.626.108.220,00	7.626.108.220,00	12.726.108.220,00	12.726.108.220,00
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

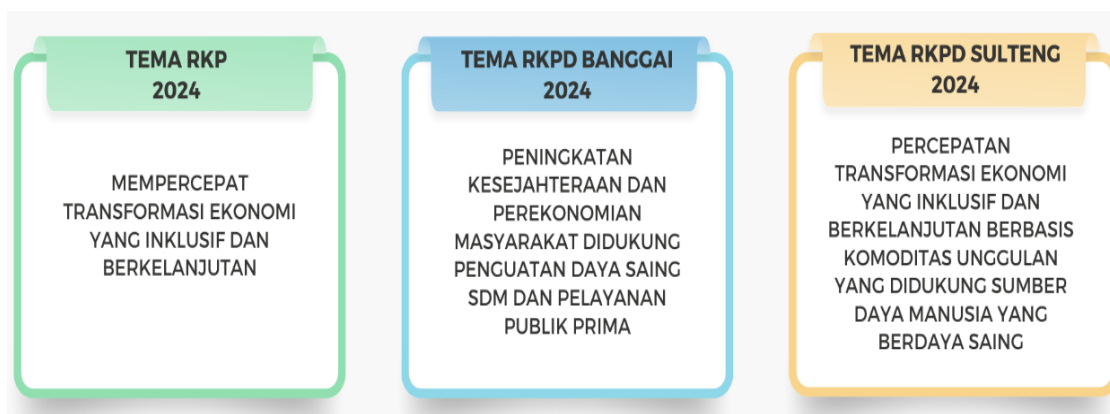
Sumber : BPKAD dan Bappeda Kabupaten Banggai, 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan tema Pembangunan Nasional dan tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 serta hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024, ditetapkan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu: ***“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DUKUNG PENGUATAN DAYA SAING SDM DAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA”***.

Gambar 4.1
Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024



Tema ini mengarahkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Banggai di Tahun 2024 di arahkan pada upaya penyediaan lapangan kerja dan usaha produktif, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat Kabupaten Banggai. Penguatan daya saing sumber daya manusia artinya peningkatan kualitas SDM agar dapat bersaing dalam pasar kerja. Sedangkan, pelayanan publik prima adalah ketersediaan akses pada layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, sehingga



masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing sumber daya manusia dan pelayanan publik prima berarti mengembangkan berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, upaya pelatihan dan pendidikan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat berkontribusi pada pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut. Pelayanan publik yang prima juga diperlukan agar masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, cepat, dan berkualitas guna memudahkan mendapatkan akses informasi serta pelayanan dengan baik. Dengan demikian, upaya tersebut akan mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai aspek secara keseluruhan.

Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2024, tema pembangunan daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta Fokus dan Prioritas Nasional (PN) dalam Narasi Rancangan RKP tahun 2024 dan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, maka ditetapkan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu meliputi 1) Industri Pengolahan/Pangan; 2) Pariwisata; 3) Ketahanan Pangan; 4) UMKM dan Wirausaha Baru; 5) Infastruktur; 6) Transformasi Digital; 7) Pembangunan Rendah Karbon;

8) Pelayanan Kesehatan; 9) Peningkatan Perlindungan Sosial; dan 10) Pelayanan Pendidikan dan Keterampilan. Fokus ini kemudian di jabarkan kedalam 8 (Delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
4. Ketahanan Pangan Daerah.
5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.
7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
8. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Gambar 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2024



Prioritas pembangunan daerah sebagaimana di atas, sesungguhnya merupakan hasil dari analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah, yang kemudian di sarikan menjadi isu strategis daerah. Berdasarkan Isu strategis daerah kemudian di rumuskan prioritas daerah sebagai upaya penyelesaian isu di maksud. Keterhubungan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah,
Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2024

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
1. Akses dan Kualitas layanan pendidikan guna Mewujudkan Banggai Cerdas belum optimal dan masih perlu di tingkatkan	1. Kualitas Sumber Daya Manusia	PD 1 Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai Sehat belum optimal dan masih perlu di tingkatkan.		
3. Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera masih perlu di tingkatkan.		
4. Kualitas Pemuda relatif masih rendah		
5. Prestasi Olah Raga Kabupaten Banggai belum optimal		
6. Kurangnya Tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai	2. Kemiskinan dan Pengangguran	PD 1 Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
dengan perkembangan pasar kerja serta kurangnya wirausaha baru		PD 2 Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi. PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar PD 4 Ketahanan Pangan Daerah
7. Penanggulangan kemiskinan daerah belum di laksanakan secara terpadu dan terintegrasi		
8. Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata	3. Keterbatasan Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah	PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9. Kualitas Jaringan Irigasi sesuai kewenangan Kabupaten masih perlu di tingkatkan		
10. Infrastruktur pelayanan publik/ perkantoran pemerintah belum memadai		
11. Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah.	4. Air Bersih, Sanitasi, Perumahan Layak dan Terjangkau	PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
12. Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan Banggai swasembada pangan	5. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah	PD 4 Ketahanan Pangan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
13. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu di tingkatkan		
14. Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan Banggai		
15. Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan		
16. Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak dan nelayan yang belum berfungsi optimal.		
17. Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.		
18. Pemanfaatan potensi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.		PD 5 Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
19. Iklim Investasi dan Penanaman modal daerah masih perlu di tingkatkan		
20. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagi bidang, utamanya untuk mendukung ekonomi digital/transformasi digital dan E-Government belum	6. Revolusi Industri 4,0 dan Transformasi Digital	PD 2 Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi. PD 3 Infrastruktur

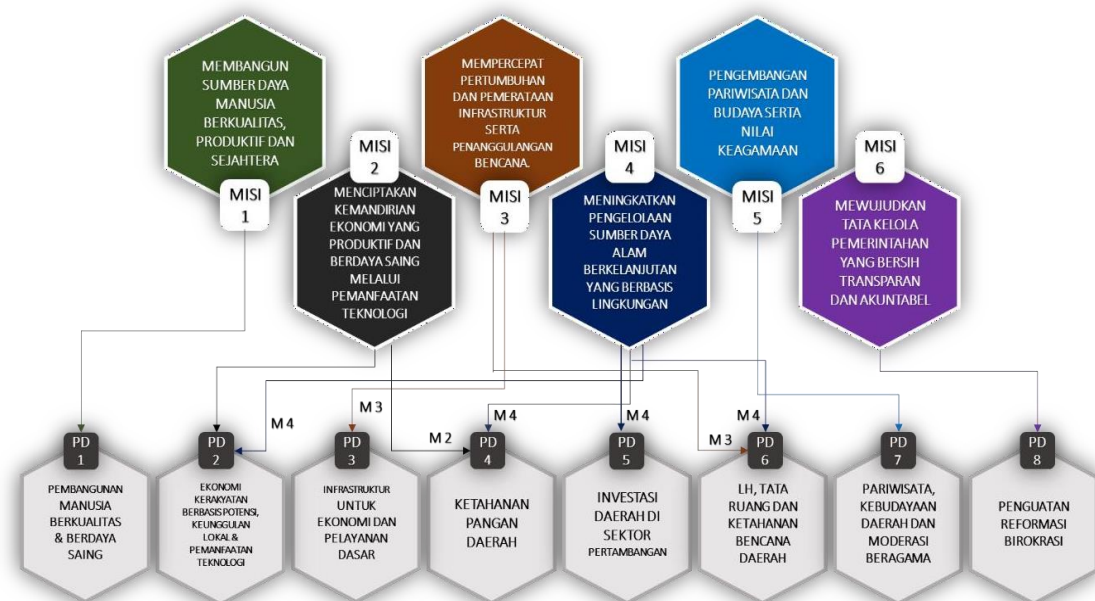
Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
optimal		untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar PD 8 Penguatan Reformasi Birokrasi.
21. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana Daerah belum optimal.	7. Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah	PD 3 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
22. Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi dan terlaksana dengan baik		PD 6 Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah
23. RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah		
24. Pengelolaan Pariwisata Daerah belum terintegrasi dan berkembang dengan baik	8. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah	PD 7 Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
25. Pemajuan dan Pelestarian Budaya Banggai, Balantak, Saluan dan Andio (Babasalan) belum dilakukan secara optimal		
26. Kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghargai antar pemeluk agama masih perlu ditingkatkan		



Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
27. Kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memuaskan	9. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	PD 8 Penguatan Reformasi Birokrasi .
28. Indeks Inovasi Daerah Cukup Baik, namun perlu di Tingkatkan		
29. Kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah belum optimal		
30. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan		
31. Belum Maksimalnya Penggalan Potensi-Pendapatan Asli Daerah (PAD).		
32. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda sudah baik, namun masih perlu di tingkatkan		
33. Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal.		
34. Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksananya yang belum berbasis TIK		
35. Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa belum sesuai yang di harapkan.		
36. Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal		

Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 merupakan upaya prioritas yang akan di lakukan dalam rangka menuntaskan pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026, karena RKPD Tahun 2024 merupakan RKPD ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026. Sinkronisasi/keterhubungan antara Misi Kepala Daerah dengan Prioritas Daerah di maksud sebagaimana pada diagram berikut :

Gambar 4.3
Sinkronisasi/Keterhubungan Misi Daerah
Tahun 2021–2026
dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024



Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, olehnya itu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 juga merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Keselarasan prioritas di maksud sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan
Provinsi Sulawesi Tengah dengan Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024

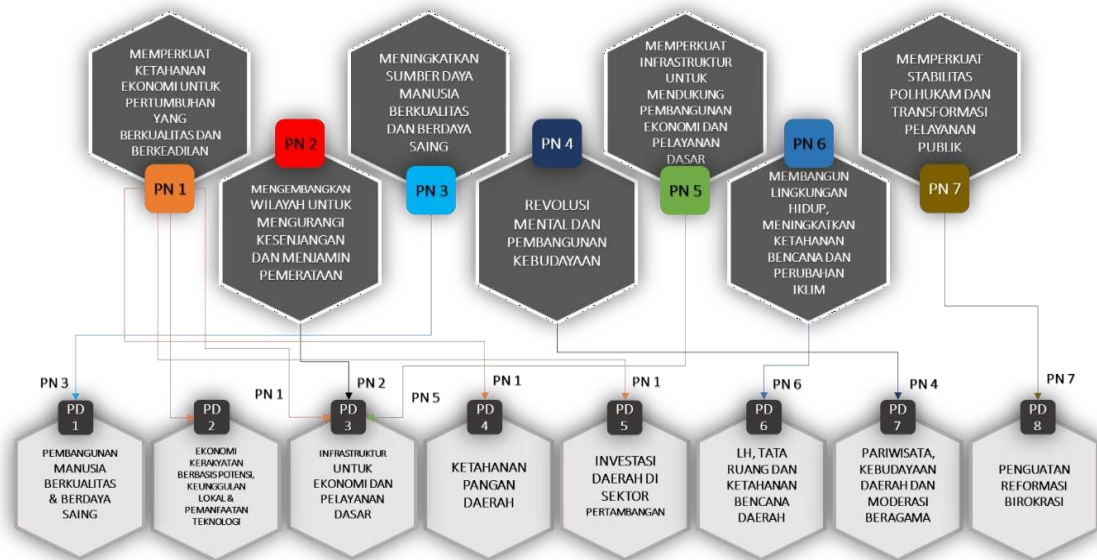
No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024		
	Nasional	Sulawesi Tengah	Banggai
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 5 : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Unggulan Prioritas 6 : Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 2 : Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal & Pemanfaatan Teknologi Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Prioritas 4 : Ketahanan Pangan Daerah Prioritas 5 : Investasi Daerah di Sektor Pertambangan Prioritas 7 : Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
2.	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 6 : Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 1 : Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Prioritas 2 : Desentralisasi Layanan Kesehatan secara Merata	Prioritas 1 : Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024		
	Nasional	Sulawesi Tengah	Banggai
		Prioritas 3 : Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 1 : Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Prioritas 7 : Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4 : Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Prioritas 8 : Penguatan Reformasi Birokrasi

Secara diagramatis, sinkronisasi antara Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai tahun 2024 sebagaimana di sajikan dalam gambar berikut :

Gambar 4.4
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2024



Setiap prioritas daerah di tetapkan sasaran yang akan di wujudkan. Sasaran di maksud bersesuaian dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, sekaligus merupakan Sasaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024. Adapun sasaran daerah berdasarkan masing-masing prioritas daerah, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2024

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
1.	Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
	a.Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar	1. Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,72	8,72
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,37
		3. Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	96,06	96,06

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
	b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,11	71,11
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	14,68	14,68
		Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	89,32	89,32
	c. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Kualitas Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,00	91,00
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	46,1	46,1
		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	51,03	51,03
		Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Kategori	Rendah	Rendah
	d. Meningkatkan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,96	68,96
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,26	2,50 - 3,00
	e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banggai	1. Angka Kemiskinan	%	5,85	6,56
		2. Gini Rasio	nilai	0,287	0,250 - 0,300
		3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	72,63	72,65 - 73,53
	f. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	40,51	40,51
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Indeks	0,2	0,2
2.	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal & Pemanfaatan Teknologi				
	a. Meningkatkan Kualitas Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKMserta Pertumbuhan Wirausaha Baru.	% Koperasi Aktif dan Berkualitas / modern	%	77,988	77,988
		% UMKMserta Kelas/Go Digital	%	86,50	86,50
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	8%	8%

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
	b. Meningkatnya Perekonomian Desa Melalui Pemberdayaan BUMDes	% BUMDes Sehat	%	49,50	49,50
		Skor Ketahanan Ekonomi Desa (Berdasarkan IDM)	%	0,5767	0,5767
	c. Meningkatnya Stabilitas Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61	4,35 – 5,37
		Inflasi Daerah	%	2,04	3,00 – 5,00
3.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
	a. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan	1. % Rumah Tangga dengan akses air minum layak dan aman	%	87,04	87,04
		2. % Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	%	84,26	84,26
		3. % Rumah Tangga dengan Akses rumah layak huni	%	87,19	87,19
	b. Tersediannya Infrastruktur Wilayah Untuk Mendukung Aktivitas Perekonomian dan Konektivitas Wilayah yang berkualitas dan Merata	1. % Luas sawah beririgasi	%	90	90
		2. % Kondisi jalan mantap Kabupaten	%	99,53	99,53
		3. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan sektor transportasi	Indeks	0,364	0,364
		4. % Desa yang telah memiliki akses terhadap jaringan internet	%	49	49
4.	Ketahanan Pangan Daerah				
	Meningkatnya Produktivitas	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,6	83,6

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
	Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	%	2,3	2,3
	Berkelanjutan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Nilai Tukar Petani	Nilai	N/A	N/A
		Nilai Tukar Nelayan	Nilai	N/A	N/A
5.	Investasi Daerah di Sektor Pertambangan				
	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Pertumbuhan sektor pertambangan dan Penggalian dalam PDRB	%	2,54	2,54
		Nilai Investasi Pertambangan Milik Daerah	Nilai	N/A	N/A
6.	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah				
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	82,018	82,018
		Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Nilai	N/A	N/A
		% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	75	75
	Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Kategori	Sedang	Sedang
7.	Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama				
	Meningkatnya Pariwisata Daerah	% Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	2,74	2,74
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Babasalan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	52,21	52,21
	Meningkatnya Moderasi Beragama Masyarakat Kabupaten Banggai	Indeks Moderasi beragama	Indeks	68	68

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Perubahan Target
8.	Penguatan Reformasi Birokrasi				
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	B	B
	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	Sangat Baik	Sangat Baik
		Nilai LPPD	Predikat	Baik	Baik
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3
		Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks	Baik	Baik
		Nilai SAKIP	Predikat	A	A
	Meningkatnya Efektivitas Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai	N/A	N/A
		Indeks Sistem Merit	Kategori	Baik	Baik

Tabel 4.4

Persandingan Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi	Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional 2024	Perubahan Sasaran Pembangunan Sulteng 2024	Perubahan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7	10,85 – 12,00	4,35 – 5,37
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	2,61 – 3,10	2,50 - 3,00
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	11,00 – 12,00	6,08 - 6,56
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,374 – 0,377	0,301 – 0,302	0,250 – 0,300



No	Indikator Ekonomi	Perubahan Sasaran Pembangunan Nasional 2024	Perubahan Sasaran Pembangunan Sulteng 2024	Perubahan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2024
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,99 – 74,02	71,66 – 72,15	72,65 – 73,53
6.	Inflasi (%)	1,5 – 3,5	2,18	3,00 – 5,00

Perubahan Sasaran dan target prioritas daerah sebagaimana tabel di atas berkonsekuensi terhadap target program dan kegiatan prioritas di setiap perangkat daerah. Penyesuaian Target program dan kegiatan berdasarkan kewenangan di maksud di sajikan pada lampiran program dan kegiatan per perangkat daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Perubahan Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2024

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dan target pada RKPD Tahun 2024, serta memperhatikan dan mempertimbangkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih periode 2021– 2026 sesuai Visi dan Misinya, maka diperlukan perubahan kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1. Pergeseran Anggaran Tahun 2024

Pergeseran anggaran tahun 2024 yang dilakukan mendahului perubahan APBD adalah Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya. Sedangkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja tidak dapat dilakukan mendahului perubahan APBD. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan pada Belanja Daerah, antara lain:

- 1) Penyesuaian sasaran dan Output kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk teknis Tahun Anggaran 2024;
 - 2) Optimalisasi sasaran dan Output kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2024 sehingga perlu adanya perubahan objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja pada sub kegiatan berdasarkan usulan dari perangkat daerah.
- b. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang mengakibatkan terjadinya perubahan antara lain :
- Penyesuaian Belanja pegawai khususnya belanja gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan usulan dari Perangkat daerah sehingga perlu adanya Perubahan rincian objek.
- c. Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Ketiga Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun



Anggaran 2024 yang dilakukan untuk Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang mengakibatkan terjadinya perubahan antara lain :

1) Untuk mendukung Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 400.4/768/Dispura tentang Penetapan Tuan Rumah POPDA PROPORNAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan pelaksanaan Kejuaraan Antar Kampung (TARKAM) di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024;

2) Penyesuaian Belanja pegawai khususnya belanja gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan usulan dari Perangkat daerah sehingga perlu adanya perubahan rincian objek.

d. Penyesuaian Keputusan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3.4.1 Tahun 2024 tentang Lokasi Penyelenggaraan Kejuaraan Antar Kampung Tahun Anggaran 2024

2. Penambahan, Penghapusan dan Pengurangan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan di dalam RKPD Tahun 2024, baik judul kegiatan, capaian dan target indikator, pagu indikatif serta lokasi kegiatan masih terdapat ketidakselarasan antara RKPD 2024 dengan APBD 2024. Berkenaan hal tersebut, serta berdasarkan pergeseran anggaran mendahului perubahan sebagaimana di atas, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RKPD 2024



terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan anggaran, penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan dan pengurangan anggaran, sebagaimana di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah
yang Melakukan Penambahan, Pengurangan dan Penghapusan Kegiatan Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG
A	Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1	URUSAN PENDIDIKAN												
	Dinas Pendidikan	6	6	6	0	18	18	18	0	123	123	123	0
2	URUSAN KESEHATAN												
	Dinas Kesehatan	10	10	10	0	38	38	38	0	83	83	83	0
	RSUD Luwuk	3	3	3	0	6	6	6	0	7	7	7	0
3	URUSAN PEKERJAAAN UMUM												
	PUPR	12	12	12	0	26	26	26	0	96	96	96	0
4.	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	5	5	5	0	19	19	19	0	83	83	83	0
5.	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
	Sat Pol Pp Dan Damkar	3	3	3	0	13	13	13	0	45	45	45	0
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	12	12	12	0	57	57	57	0
	Dinas Pemadam Kebakaran	2	2	2	0	12	12	12	0	50	50	50	0
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	Dinas Sosial	7	7	7	0	18	18	18	0	82	82	82	0

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG
B	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
6.	URUSAN TENAGA KERJA												
	Dinas Tenaga Kerja	5	5	5	0	22	22	22	0	42	42	42	0
7.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK												
	DP2KBP3A	11	11	11	0	30	30	30	0	18	18	18	0
8.	URUSAN PANGAN												
	Dinas Ketahanan Pangan	10	10	10	0	30	30	30	0	42	42	42	0
9.	URUSAN PERTANAHAN												
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	6	6	0	7	7	7	0	10	10	10	0
10.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												
	Dinas Lingkungan Hidup	22	22	22	0	44	44	44	0	60	60	60	0
11.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan CAPIL												
	Dinas kependudukan dan Capil	5	5	5	0	18	18	18	0	55	55	55	0
12.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	10	10	0	24	124	24	0	67	67	67	0
13.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	6	6	0	14	14	14	0	50	50	50	0
14.	URUSAN PERHUBUNGAN												
	Dinas Perhubungan	6	6	6	0	46	46	46	0	60	60	60	0
15.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	3	0	11	11	11	0	63	63	63	0
16.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
	Dinas Koperasi dan UKM	8	8	8	0	15	15	15	0	43	43	43	0
17.	URUSAN PENANAMAN MODAL												
	DPMPTSP	6	6	6	0	13	13	13	0	44	44	44	0
18.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8	8	8	0	30	30	30	0	51	51	51	0
19.	URUSAN STATISTIK												
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	0	1	1	1	0	5	5	5	0
20.	URUSAN PERSANDIAN												
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	0	2	2	2	0	5	5	5	0
21.	URUSAN KEBUDAYAAN												

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	5	5	0	9	9	9	0	19	19	19	0
22.	URUSAN PERPUSTAKAAN												
	Dinas Perpustakaan	3	3	3	0	12	12	12	0	43	43	43	0
23.	URUSAN KEARSIPAN												
	Dinas Perpustakaan	3	3	3	0	8	8	8	0	14	14	14	0
C	URUSAN PILIHAN												
24.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	Dinas Perikanan	8	8	8	0	36	36	36	0	48	48	48	0
25.	URUSAN PARIWISATA												
	Dinas Pariwisata	5	5	5	0	18	18	18	0	75	75	75	0
26.	URUSAN PERTANIAN												
	Dinas TPHP	6	6	6	0	21	21	21	0	44	44	44	0
	Dinas Peternakan	6	6	6	0	21	21	21	0	52	52	52	0
27.	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
	Dinas Perdagangan	2	2	2	0	2	2	2	0	4	4	4	0
28.	URUSAN PERDAGANGAN												
	Dinas Perdagangan	14	14	14	0	46	46	46	0	50	50	50	0
29.	URUSAN PERINDUSTRIAN												
	Dinas Perdagangan	6	6	6	0	6	6	6	0	22	22	22	0
30.	URUSAN TRANSMIGRASI												
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	3	0	3	3	3	0	6	6	6	0
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	Sekretariat Daerah	6	6	6	0	36	36	36	0	76	76	76	0
	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	17	17	17	0	70	70	70	0

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM				JUMLAH KEGIATAN				JUMLAH SUB KEGIATAN			
		RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024	TAMBAH/ KURANG
E	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	PERENCANAAN												
	Bappeda	3	3	3	0	15	15	15	0	76	76	76	0
	KEUANGAN												
	BPKAD	3	3	3	0	14	14	14	0	86	86	86	0
	Badan Pendapatan	3	3	3	0	10	10	10	0	51	51	51	0
	KEPEGAWAIAN												
	BKPSDM	2	2	2	0	12	12	12	0	52	52	52	0
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	BKPSDM	3	3	3	0	14	14	14	0	4	4	4	0
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	Badan Riset Daerah	2	2	2	0	12	12	12	0	6	6	6	0
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
	Inspektorat Daerah	6	6	6	0	24	24	24	0	50	50	50	0
G.	UNSUR KEWILAYAHAN												
	Kecamatan	120	120	120	0	312	312	312	0	720	720	720	0
H.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	12	12	12	0	59	59	59	0
JUMLAH		467	467	467	0	1405	1405	1405	0	3604	3604	3604	0

5.2 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Perubahan Kerangka Pendanaan RKPD
Kabupaten Banggai Tahun 2024

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD 2024	Bertambah/ Berkurang
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	253.313.354.132,00	253.313.354.132,00	(7.370.000.000,00)
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	116.168.011.100,00	116.168.011.100,00	(7.370.000.000,00)
4 1 02	Hasil Retribusi Daerah	27.282.576.950,00	27.282.576.950,00	-
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	-
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107.262.766.082,00	107.262.766.082,00	
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.886.010.712.964,00	2.886.010.712.964,00	
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.819.073.724.788,00	2.826.073.724.788,00	
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.936.988.176,00	67.136.988.176	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.360.441.188,00	27.360.441.188,00	
4 3 01	Pendapatan Hibah	2.515.559.000,00	2.515.559.000,00	
4 3 03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	24.844.882.188,00	24.844.82.188,00	
5	BELANJA	2.360.864.873.499	2.458.781.689.115	97.916.815.616
5 1	BELANJA OPERASI	2.137.396.233.798,00	2.206.155.417.089,00	68.759.183.291,00
5 1 01	Belanja Pegawai	1.049.065.642.013,00	1.042.605.961.612,00	(6.459.680.401,00)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.489.312.909,00	1.023.289.427.699,00	62.800.114.790,00
5 1 04	Belanja Subsidi	404.000.000,00	404.000.000,00	-
5 1 05	Belanja Hibah	122.323.078.281,00	134.805.327.673,00	-
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	5.114.200.595,00	5.050.700.105,00	-
5 2	BELANJA MODAL	639.971.274.861,00	699.921.897.220,00	59.950.622.359,00
5 2 01	Belanja Tanah	3.430.000.000,00	7.030.000.000,00	3.600.000.000,00
5 2 02	Belanja Peralatandan Mesin	141.134.685.276,00	203.588.790.808,00	62.454.105.532,00
5 2 03	Belanja Gedungdan Bangunan	213.460.104.020,00	216.258.062.626,00	2.797.958.806,00
5 2 04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	281.131.485.565,00	301.519.430.000,00	20.387.944.435,00
5 2 05	Belanja Aset Tetap Lainnya	260.000.000,00	260.000.000,00	-
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	555.000.000,00	410.650.000,00	(144.350.000,00)

Kode Akun	Uraian	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD 2024	Bertambah/ Berkurang
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00	-
5.3. 01	Belanja Tak Terduga	11.284.301.600,00	11.284.301.600,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	408.911.589.805,00	415.911.589.805,00	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.345.058.805,00	14.345.058.805,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.566.531.000,00	401.566.531.000,00	-
	Jumlah Belanja	3.197.563.400.064,00	3.362.418.241.928,00	164.854.841.864,00
	SURPLUS/DEFISIT	(30.878.891.780,00)	(188.533.733.644,00)	(157.654.841.864,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	44.605.000.000,00	202.259.841.864,00	157.654.841.864,00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.605.000.000,00	201.259.841.864,00	157.654.841.864,00
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00	-
6 2 02	Penyertaan Modal (Investasi) pemda	12.726.108.220,00	12.726.108.220,00	-
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.726.108.220,00	13.726.108.220,00	
	Pembiayaan Netto	30.878.891.780,00	188.533.733.644,00	157.654.841.864,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-		

Mendasari perubahan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana di atas, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, maka di rumuskan pagu indikatif per Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3
Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Perubahan 2024
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	11	27	142	650,619,830,474.00
2	Dinas Kesehatan	10	38	83	339,219,105,944.00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Perubahan 2024
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	3	6	7	225,690,302,732.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	26	96	453,029,136,435.00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	26	93	31,296,826,633.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3	13	45	16,065,472,530.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	57	9,727,685,807.00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	12	50	13,030,410,513.00
9	Dinas Sosial	7	18	82	35,618,936,195.00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	25	48	11,346,032,122.00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	44	68	20,709,065,936.00
12	Dinas Ketahanan Pangan	10	30	42	13,187,684,676.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	22	44	60	26,825,052,710.00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	18	55	13,920,278,217.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	24	67	18,559,103,007.00
16	Dinas Perhubungan	6	46	60	29,651,559,434.00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	14	73	30,021,982,858.00
18	Dinas Koperasi dan UKM	8	15	43	10,774,979,666.00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	6	13	44	14,365,078,285.00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	8	30	51	25,618,621,007.00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	20	57	20,363,005,973.00
23	Dinas Pariwisata	5	18	75	12,958,670,102.00
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	6	21	44	146,110,720,081.00
25	Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan	6	21	52	34,842,337,903.00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Perubahan 2024
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22	54	76	15,311,890,487.00
27	Sekretariat Daerah	6	36	76	130,070,880,917.00
28	Sekretariat DPRD	2	17	70	64,926,417,101.00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	76	29,390,913,840.00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	86	468,212,999,310.00
31	Badan Pendapatan Daerah	3	10	51	21,310,908,016.00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	26	56	19,622,873,571.00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	12	6	12,340,674,886.00
34	Inspektorat	6	24	50	22,405,453,149.00
35	Kecamatan Nuhon	5	13	30	8,534,783,948.00
36	Kecamatan Bunta	5	13	30	10,597,985,118.00
37	Kelurahan Bunta I	2	6	16	687,673,950.00
38	Kelurahan Bunta II	2	6	16	686,500,000.00
39	Kelurahan Salabenda	2	6	16	677,950,000.00
40	Kelurahan Kalaka	2	6	16	686,500,000.00
41	Kecamatan Pagimana	5	13	30	11,877,053,776.00
42	Kelurahan Pagimana	2	6	16	711,797,408.00
43	Kelurahan Pakowa	2	6	16	666,260,441.00
44	Kelurahan Basabungan	2	6	16	707,170,909.00
45	Kecamatan Bualemo	5	13	30	8,178,010,912.00
46	Kecamatan Balantak	5	13	30	9,978,047,564.00
47	Kelurahan Balantak	2	6	16	741,999,230.00
48	Kelurahan Talang Batu	2	6	16	741,999,546.00
49	Kelurahan Dale-Dale	2	6	16	741,988,368.00
50	Kecamatan Lamala	5	13	30	8,740,484,726.00
51	Kecamatan Masama	5	13	30	8,142,409,600.00
52	Kecamatan Luwuk Timur	5	13	30	8,279,996,416.00
53	Kecamatan Luwuk	5	13	30	16,935,179,830.00
54	Kelurahan Mangkio Baru	2	6	16	671,072,160.00
55	Kelurahan Keleke	2	6	16	664,286,242.00
56	Kelurahan Bungin	2	6	16	665,969,135.00
57	Kelurahan Luwuk	2	6	16	708,261,646.00
58	Kelurahan Bungin Timur	2	6	16	661,471,948.00
59	Kelurahan Soho	2	6	16	670,922,316.00
60	Kelurahan Karaton	2	6	16	676,771,790.00
61	kelurahan Baru	2	6	16	671,032,402.00
62	Kecamatan Kintom	5	13	30	11,407,895,437.00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Perubahan 2024
63	Kelurahan Kintom	2	6	16	661,700,000.00
64	Kelurahan Mendono	2	6	16	658,850,000.00
65	Kelurahan Mondonun	2	6	16	657,799,150.00
66	Kecamatan Batui	5	13	30	12,262,461,046.00
67	Kelurahan Tolando	2	6	16	719,000,000.00
68	Kelurahan Batui	2	6	16	703,922,397.00
69	Kelurahan Sisipan	2	6	16	708,800,000.00
70	Kelurahan Bakung	2	6	16	697,250,000.00
71	Kelurahan Balantang	2	6	16	723,350,000.00
72	Kelurahan Bugis	2	6	16	702,500,000.00
73	Kelurahan Lamo	2	6	16	733,250,000.00
74	Kecamatan Toili	5	13	30	8,921,513,906.00
75	Kelurahan Cendana	2	6	16	686,838,880.00
76	Kecamatan Toili Barat	5	13	30	8,458,222,223.00
77	Kecamatan Simpang Raya	5	13	30	7,795,632,491.00
78	Kecamatan Lobu	5	13	30	7,911,116,099.00
79	Kecamatan Moilong	5	13	30	7,501,746,017.00
80	Kecamatan Batui Selatan	5	13	30	7,733,285,163.00
81	Kecamatan Balantak Selatan	5	13	30	7,855,984,009.00
82	Kecamatan Nambo	5	13	30	12,260,950,423.00
83	Kelurahan Nambo Lempek	2	6	16	664,611,874.00
84	Kelurahan Nambo Lempek Baru	2	6	16	664,612,122.00
85	Kelurahan Nambo Bosaa	2	6	16	664,609,602.00
86	Kelurahan Nambo Padang	2	6	16	668,501,242.00
87	Kelurahan Lontio	2	6	16	664,612,000.00
88	Kelurahan Lontio Baru	2	6	16	664,612,220.00
89	Kecamatan Luwuk Selatan	5	13	30	15,557,201,081.00
90	Kelurahan Tanjung Tuwis	2	6	16	668,892,092.00
91	Kelurahan Tombang Permai	2	6	16	665,599,543.00
92	Kelurahan Maahas	2	6	16	780,899,644.00
93	Kelurahan Bukit Mambual	2	6	16	707,842,678.00
94	Kelurahan Kompo	2	6	16	668,893,012.00
95	Kelurahan Simpong	2	6	16	674,291,970.00
96	Kelurahan Hanga-Hanga	2	6	16	682,393,133.00
97	Kelurahan Hanga-Hanga Permai	2	6	16	765,942,981.00
98	Kelurahan Jole	2	6	16	664,933,183.00
99	Kecamatan Luwuk Utara	5	13	30	10,307,804,375.00
100	Kelurahan Kilongan Permai	2	6	16	682,715,078.00
101	Kelurahan Kilongan	2	6	16	679,869,720.00



No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Perubahan 2024
102	Kecamatan Balantak Utara	5	13	30	7,719,322,760.00
103	Kecamatan Mantoh	5	13	30	7,847,957,237.00
104	Kecamatan Toili Jaya	5	13	30	7,918,828,570.00
105	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	59	82,092,734,908.00
JUMLAH		467	1405	3604	3.362.418.241.928,00

Rincian Program, Kegiatan dan sub kegiatan masing – masing Perangkat Daerah di sajikan dalam lampiran Buku Perubahan RKPD ini. Daftar di maksud merupakan hasil print out dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana kerja yang telah di tetapkan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024.